

PROFIL GENDER DAN ANAK

**KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN DATUK LAKSEMANA BENGKALIS**



BUKU DATA PROFIL GENDER

KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BENGKALIS**

**TIM PELAKSANA PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025**

Penanggung Jawab

EMILDA SUSANTI, S. STP. M.IP

Ketua

H. EDIYANTO, SKM., M.Si

Anggota

Hj. KURNIA DINA LESTARI, S.H., M.Si

ALFIANDRI, S.T. M.Si

SRI SUSIYATI, S. Sos

Ners. RINI KHAIRIYANTI, S.Kep

POPYANA ARISHA, A.Md.Keb

M. SYAFAWI, S.Pd.I

**Tim Pengumpulan Data, Pengelolaan Data dan Penyaji Data Profil Gender di
Kabupaten Bengkalis tahun 2025**

JUWANDI, M.H

YULMITRA HANDAYANI, M.H

ADE IDRA SUHARA, M.Si

MUFARO'AH, M.Si

SAMBUTAN BUPATI BENGKALIS

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, kami menyambut baik dengan telah diterbitkannya Profil Gender dan Anak Kabupaten Bengkalis tahun 2025 yang merupakan hasil Kerjasama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis dengan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Datuk Laksemana Bengkalis.

Dengan diterbitkannya Profil Gender dan Anak ini, patut kita hargai dan sambut dengan senang hati karena data dalam profil ini memuat data-data terpilah tentang permasalahan gender dari berbagai bidang di Kabupaten Bengkalis. Undang-Undang Dasar 1945 mengamankan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang Pembangunan wajib menjamin hak setiap warga negara untuk menikmati dan berpartisipasi dalam Pembangunan dan menikmati hasilnya.

Sejalan dengan Amanah Undang-Undang, selanjutnya dalam perwujudan hal tersebut diikuti dengan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender yang disingkat dengan PUG dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut mengamanahkan kepada seluruh Menteri, Kepala Daerah: Gubernur, Walikota, Bupati untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan.

Dalam perencanaan dan evaluasi sebagaimana tersebut di atas, ketersediaan data merupakan faktor penting dan mutlak adanya. Data diperlukan agar bisa dijadikan pijakan dalam membuat perencanaan dan evaluasi khususnya data terpilah menurut jenis kelamin.

Saya selaku Bupati Bengkalis berharap agar data dalam Profil Gender dan Anak ini benar-benar bisa digunakan sebaik-baiknya oleh semua pihak sebagai acuan penting dalam pembangunan berwawasan gender dalam mewujudkan Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA).

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan Profil Gender dan Anak diberikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih.



VISI MISI KABUPATEN BENGKALIS

VISI KABUPATEN BENGKALIS:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA”

Penjelasan Visi, sebagai berikut:

1. **Bermarwah**, Bermakna: Suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
2. **Maju**, Bermakna : Suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang professional dan berwibawa.
3. **Sejahtera**, Bermakna : Suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Penjelasan Misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

**VISI MISI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS**

VISI:

“TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PEMENUHAN HAK ANAK, MENUJU PEMBANGUNAN MANUSIA BERDAYA KELUARGA SEJAHTERA”

MISI:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dalam mewujudkan Bengkalis menuju kota layak anak.
2. Meningkatkan peran perangkat daerah serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan bidang Pendidikan, Kesehatan, Politik, Ekonomi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga melalui Penguatan Usaha Ekonomi Perempuan.

DASAR-DASAR PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan, laki-laki dan perempuan seringkali menghadapi kondisi yang berbeda, baik dari segi akses, partisipasi, kontrol, maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Perbedaan tersebut bukan hanya terjadi karena faktor biologis, melainkan juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial, budaya, serta kebijakan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan gender. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pengarusutamaan gender yang sistematis agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Dasar filosofi dari pengarusutamaan gender adalah pengakuan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan, hukum, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip kesetaraan dan keadilan gender bukanlah konsep yang terpisah dari pembangunan, melainkan bagian integral dari pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Secara yuridis, dasar pelaksanaan PUG di Indonesia antara lain:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, khususnya:
 - a) **Pasal 27 ayat (1)**: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
 - b) **Pasal 28D ayat (1)**: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
2. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984** tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang menegaskan kewajiban negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
3. **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000** tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi tonggak utama penerapan PUG di seluruh sektor pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
4. Berbagai regulasi turunan lain, termasuk **RPJMN dan RPJMD**, yang secara eksplisit memasukkan isu gender ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Pengarusutamaan gender berlandaskan pada beberapa prinsip dasar yang menjadi kerangka pelaksanaan di lapangan, yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kebudayaan.

2. Prinsip Keadilan

Memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing, termasuk afirmasi khusus untuk kelompok yang masih tertinggal.

3. Prinsip Partisipasi

Mendorong keterlibatan aktif laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan semua pihak.

4. Prinsip Akses dan Kontrol

Menjamin setiap individu dapat mengakses sumber daya pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik) sekaligus memiliki kontrol terhadap penggunaannya.

5. Prinsip Manfaat

Hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara adil, tanpa ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan.

Tujuan utama dari PUG adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek pembangunan. Hal ini mencakup:

1. Menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan agar sejajar dengan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan.
3. Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara.
4. Menjamin keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan, sehingga pembangunan tidak hanya dinikmati oleh satu kelompok gender saja.
5. Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat, tanpa diskriminasi.

Agar tujuan tersebut tercapai, pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui strategi-strategi berikut:

1. Analisis Gender

Dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan peran, kondisi, kebutuhan, dan hambatan yang dihadapi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Analisis ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program yang responsif gender.

2. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

PPRG memastikan bahwa alokasi sumber daya pembangunan dirancang sesuai kebutuhan laki-laki dan perempuan, sehingga lebih efektif dan adil.

3. **Penguatan Kelembagaan PUG**

Melalui pembentukan *focal point*, Kelompok Kerja (Pokja) PUG, serta unit layanan dan regulasi pendukung di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

4. **Penyediaan Data Terpilah**

Data yang terpisah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kondisi sosial-ekonomi menjadi instrumen penting untuk mengukur keberhasilan implementasi PUG.

5. **Monitoring dan Evaluasi**

Dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sudah menerapkan perspektif gender, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Pengarusutamaan gender bukan hanya sebuah kewajiban formal, tetapi sebuah kebutuhan nyata dalam mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan berkelanjutan. Tanpa adanya PUG, pembangunan berpotensi melanggengkan ketidakadilan, diskriminasi, serta ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, setiap pemangku kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk memahami, menginternalisasi, serta melaksanakan prinsip-prinsip dasar PUG dalam setiap tahapan pembangunan.

Dengan melaksanakan pengarusutamaan gender secara konsisten, diharapkan Kabupaten Bengkalis dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, di mana baik laki-laki maupun perempuan dapat berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan secara setara.

KATA PENGANTAR

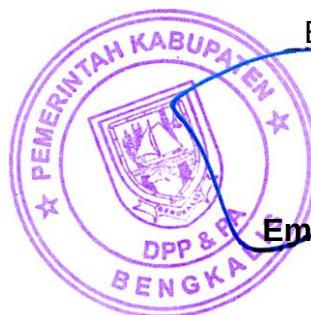
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga **Buku Data Profil Gender dan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025** telah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Buku ini terbit berkat adanya jalinan kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dengan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Bengkalis.

Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan gender dan anak banyak masalah belum terpecahkan karena kurangnya ketersediaan data yang relevan sampai sekarang sehingga kesetaraan dan keadilan gender dan anak belum dapat diwujudkan secara optimal. Dengan adanya buku ini diharapkan OPD dan stakeholder lainnya dapat memanfaatkannya sebagai bahan pengambil kebijakan pembangunan di bidang masing-masing. Dalam penyusunan Buku ini, kami telah banyak mendapat bantuan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bupati Bengkalis yang telah berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
2. Tim Driver (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis selaku penggerak) dan (Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Datuk Laksemana Bengkalis) sebagai Tim penulis Buku Gender dan anak tahun 2025.
3. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudari dari OPD terkait yang telah memberikan berbagai sumbangan pemikiran saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini.
4. Dan kepada semua pihak seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, Pengadilan Agama, Polres Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah berupaya untuk menyelesaikan buku ini.

Semoga semua sumbangan moril dan materil yang diberikan menjadi amal dan mendapat imbalan berlipat ganda.

Kami menyadari ini sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu segala kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.



Bengkalis, 15 Agustus 2025

Emilda Susanti, S.STP., M.IP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	2
3. Sumber Data	2
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	3
Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	3
BAB III DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG KEPENDUDUKAN.....	7
1. Komposisi Umur dan Jenis Kelamin.....	7
2. Komposisi Menurut Wajib KTP, Akta dan KIA.	8
3. Umur Perkawinan Pertama.....	8
4. Anak Lahir Hidup, Anak Masih Hidup, dan Anak Sudah Meninggal	9
5. Keluarga Berencana (KB)	9
BAB IV DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG KEPENDIDIKAN.....	15
1. Partisipasi Sekolah.....	15
2. Angka Melek Huruf.....	21
3. Angka Putus Sekolah.....	23
4. Angka Sertifikasi Guru	23
5. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	24
BAB V DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG KESEHATAN	25
1. Rumah Sakit Umum Daerah	25
2. Ibu Hamil dan Bayi.....	34
BAB VI DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG EKONOMI DAN TENAGA KERJA 40	
1. Penduduk Dan Ketenagakerjaan	40
2. Karakteristik Penduduk Usia Kerja	40
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	42
4. Pendidikan Pekerja	43

5. Lapangan Pekerjaan Utama.....	44
6. Pengangguran.....	45
a. Pengangguran terbuka.....	45
b. Pengangguran terdidik	46
c. Pekerja Tidak Penuh	46
BAB VII SOSIAL DAN HUKUM	48
1. Hukum dan Keamanan.....	48
2. Satuan Pamong Praja Bengkalis.....	57
BAB VIII PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK.....	59
1. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.....	59
2. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Yudikatif	62
BAB IX PENUTUP.....	68
1. Kesimpulan.....	68
2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 2. 2 Diagram Persentase Rasio Luas Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 2. 3 Diagram Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Bengkalis (Km)</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 6. 1 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.....</i>	<i>41</i>
<i>Gambar 6. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-023.....</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 6. 3 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.....</i>	<i>44</i>
<i>Gambar 6. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.....</i>	<i>45</i>
<i>Gambar 6. 5 Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.....</i>	<i>46</i>
<i>Gambar 7. 1 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2023</i>	<i>51</i>
<i>Gambar 7. 2 Jumlah Kasus yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 s.d. 2023.....</i>	<i>58</i>
<i>Gambar 8. 1 Diagram Komposisi ASN Pemkab Bengkalis 2023-2024</i>	<i>65</i>
<i>Gambar 8. 2 Presentase PNS Perempuan per kecamatan-Kabupaten Bengkalis 2023</i>	<i>66</i>
<i>Gambar 8. 3 Diagram Keterlibatan Perempuan dalam PNS Kab. Bengkalis</i>	<i>67</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1 Letak Geografis Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kab. Bengkalis Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024</i>	<i>7</i>
<i>Tabel 3. 2 Jumlah Peserta KB Aktif Yang Dilayani Oleh Faskes Pemerintah Per Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024</i>	<i>10</i>
<i>Tabel 3. 3 Data Anak Memiliki Akta dan KIA Kab. Bengkalis tahun 2024.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 3. 4 Data Usia Pengantin tahun 2023.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 3. 5 Data usia Pengantin 2024.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 4. 1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 4. 2 Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 4. 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 4. 4 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 4. 5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 4. 6 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 4. 7 Data Angka Putus Sekolah tahun 2024 Perkecamatan Kab. Bengkalis ...</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 4. 8 Data Angka Sertifikasi Guru tahun 2024 Perkecamatan Kab. Bengkalis .</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 4. 9 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 5. 1 Jumlah tenaga kesehatan di RSUD Bengkalis Tahun 2016 – 2023 (Orang)</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 5. 2 Jumlah dokter di RSUD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2023 (Orang)</i>	<i>26</i>

Tabel 5. 3 Jumlah tempat tidur RSUD Bengkalis Tahun 2016 – 2022 (Tempat Tidur)	27
Tabel 5. 4Jumlah pasien rawat inap, rawat jalan dan instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Bengkalis Tahun 2016 – 2023.....	28
Tabel 5. 5Jumlah bayi lahir, kematian bayi dan bayi gizi buruk di RSUD Bengkalis Tahun 2016 – 2022 (Orang).....	29
Tabel 5. 6 Indeks kepuasan masyarakat (IKM), Status akreditasi, dan Cost Recovery Rate RSUD Bengkalis Tahun 2016 – 2022	30
Tabel 5. 7 Jumlah pasien berdasarkan jenis jaminan Kesehatan Tahun 2016 – 2022 (Orang).....	31
Tabel 5. 8 Jumlah Bayi Lahir dan Kematian Bayi di RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2022 s.d. 2023 (Jiwa).....	33
Tabel 5. 9 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Bengkalis Tahun 2023	34
Tabel 5. 10 Gender/Pelayanan dan lain lain, Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis Tahun 2023-2024.....	38
 Tabel 6. 1 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama danJenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023.....	41
Tabel 6. 2 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023	47
 Tabel 7. 1 Jumlah Produk Hukum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 s.d. 2021, dan 2023.....	48
Tabel 7. 2 Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD Tahun 2019 s.d. 2023	49
Tabel 7. 3 Data DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2023	49
Tabel 7. 4 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2023	52
Tabel 7. 5 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2023	53
Tabel 7. 6 Jumlah Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Layanan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2023	54

<i>Tabel 7. 7 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2023.....</i>	<i>54</i>
<i>Tabel 7. 8 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkalis.</i>	<i>55</i>
<i>Tabel 7. 9 Jumlah Satuan Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 s.d. 2023</i>	<i>57</i>
<i>Tabel 8. 1Jumlah fraksi/partai politik yang mendapatkan kursi pada DPRD Kabupaten Bengkalis periode ini adalah 7 fraksi, yaitu:</i>	<i>61</i>
<i>Tabel 8. 2 Data Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif</i>	<i>62</i>
<i>Tabel 8. 3 Data Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif (Pengadilan Negeri Bengkalis)</i>	<i>63</i>
<i>Tabel 8. 4 Data Jumlah PNS Per Kecamatan dan Jenis Kelamin di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023</i>	<i>65</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terbatasnya ketersediaan data gender dan anak menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kesenjangan pencapaian pembangunan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan dan anak. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal yang sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan yang pada prinsipnya IDG melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Agenda pembangunan pasca era Millenium Development Goals (MDGs) adalah SDGs (Sustainable Goals) dimana isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai Adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.

Permasalahan ketidakadilan gender dan anak ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang - undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Hal ini berarti ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan merupakan masalah yang masih dihadapi di masa mendatang.

Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah

dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin di daerahnya melalui Permen PPPA Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

2. Tujuan

Penyusunan buku ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perspektif gender dan anak.
2. Meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender dan anak bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Meningkatkan komitmen untuk menggunakan statistik dan analisis gender dan anak dalam melakukan penyusunan perencanaan dan monitoring berbagai program dan kegiatan di Kabupaten Bengkalis.
4. Sebagai bahan untuk mengambil kebijakan untuk perencanaan pembangunan yang responsif gender dan anak melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Buku Profil Gender Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dan 2024 adalah data sekunder yang dihimpun dari Perangkat Daerah dan pihak terkait di Kabupaten Bengkalis.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2° 30' Lintang Utara (LU), -0° 17' Lintang Utara atau 100° 52' Bujur Timur (BT), -102° 52' Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km², meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasinya sebagian diantaranya meliputi wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri - Bengkalis 106 kilometer, Dumai- Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipisahkan oleh laut.

Kabupaten Bengkalis hanya memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa (dari total 166 kecamatan, 268 kelurahan dan 1.591 desa di seluruh Riau). Pada tahun 2024, jumlah penduduknya sebesar 671.725 jiwa dengan luas wilayahnya 6.975,41 km² dan sebaran penduduk 77 jiwa/km². Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten paling utara dari Provinsi Riau dan berbatasan Langsung dengan :

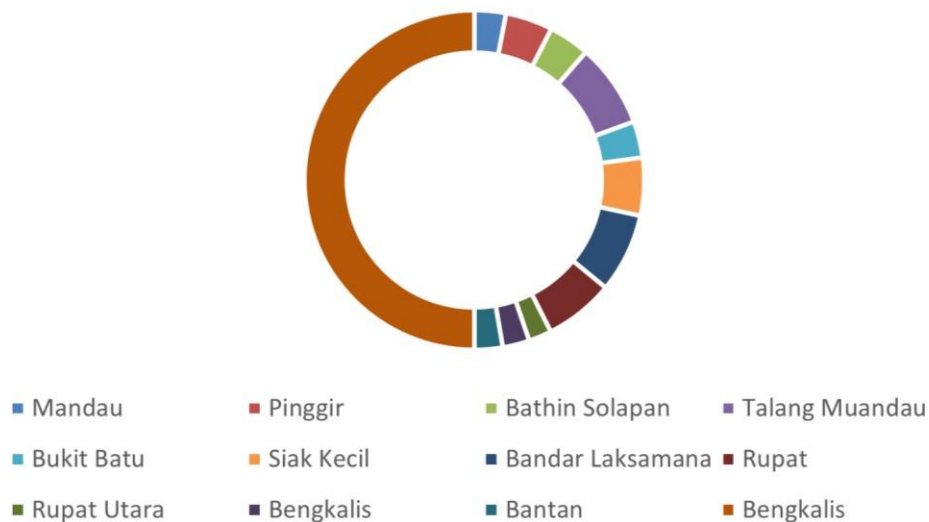
Bagian Utara	: Selat Melaka
Bagian Timur	: Selat Melaka dan Kabupaten Meranti
Bagian Selatan	: Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti
Bagian Barat	: Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Kota Dumai

Berdasarkan batas-batas wilayah di atas peta daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Bengkalis

Luas Wilayah (Km2)



Gambar 2. 2 Diagram Persentase Rasio Luas Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

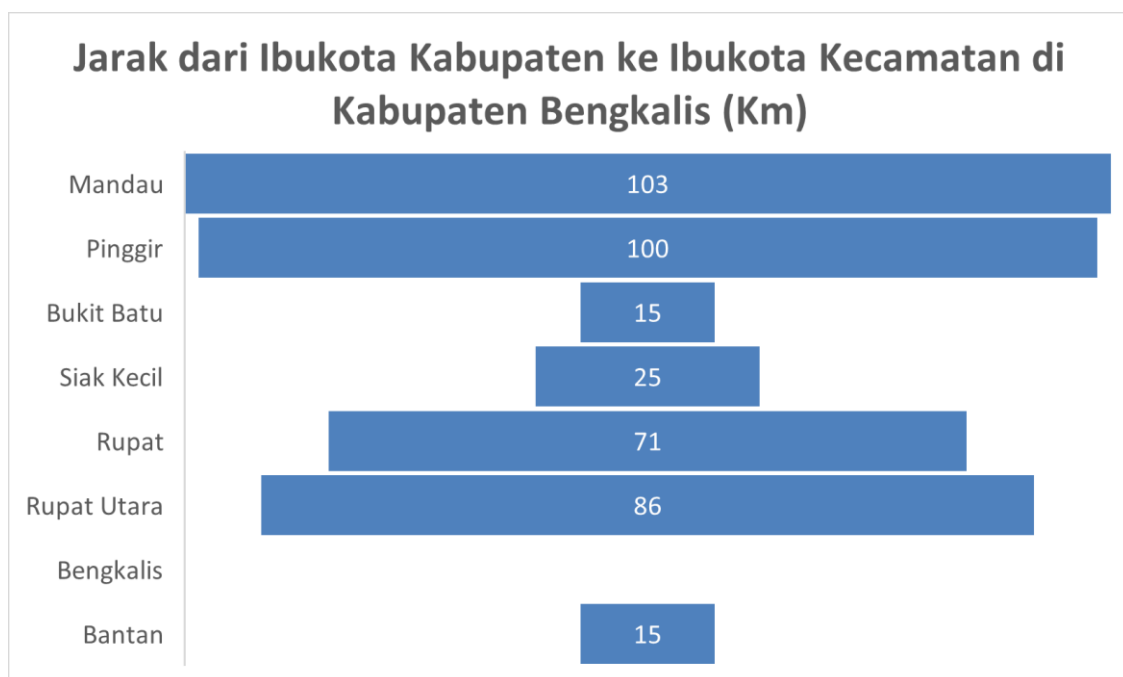
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Berdasarkan data yang divisualisasikan dalam bentuk diagram pie, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan dalam distribusi luas wilayah antar kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Bengkalis merupakan wilayah terluas di kabupaten ini, ditunjukkan dengan porsi diagram yang paling besar secara mencolok. Luas wilayah Kecamatan Bengkalis melebihi wilayah-wilayah lainnya, sehingga memainkan peran penting dalam aspek tata ruang, pembangunan wilayah, dan perencanaan infrastruktur di kabupaten ini.

Kecamatan Talang Muandau, Pinggir, dan Bathin Solapan juga memiliki proporsi wilayah yang cukup besar, menandakan bahwa kawasan-kawasan ini memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan perdesaan, sektor pertanian, maupun kehutanan.

Sementara itu, kecamatan seperti Bantan, Bukit Batu, Rumat Utara, dan wilayah inti Kecamatan Bengkalis (kota) memiliki luas yang relatif kecil, yang kemungkinan lebih fokus pada kepadatan penduduk, pelayanan publik, dan sektor perdagangan atau pariwisata.



Gambar 2. 3 Diagram Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Bengkalis (Km)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Dari diagram batang di atas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bengkalis memiliki jarak terdekat ke Ibu Kota Kabupaten Bengkalis, yakni 0 Km, karena menjadi pusat pemerintahan kabupaten itu sendiri. Sementara itu, Kecamatan Mandau memiliki jarak terjauh, yaitu 103 Km dari ibukota kabupaten.

Jarak antar ibukota kecamatan ini menunjukkan sebaran wilayah Kabupaten Bengkalis yang cukup luas dan beragam, yang tentu memerlukan

strategi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang merata dan efisien, terutama bagi kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan.

Tabel 2. 1 Letak Geografis Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Letak Geografis (Umum)	Koordinat (Lintang & Bujur Timur)
1	Mandau	Air Jamban	Barat Daya	$\pm 1.280^{\circ}$ LU, 101.900° BT
2	Pinggir	Pinggir	Barat	$\pm 1.290^{\circ}$ LU, 101.730° BT
3	Bathin Solapan	Sebanga	Barat Laut	$\pm 1.340^{\circ}$ LU, 101.810° BT
4	Talang Muandau	Balai Pungut	Tenggara	$\pm 1.100^{\circ}$ LU, 101.980° BT
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	Selatan	$\pm 1.222^{\circ}$ LU, 102.190° BT
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	Selatan	$\pm 1.080^{\circ}$ LU, 102.110° BT
7	Rupat	Batu Panjang	Utara	$\pm 1.710^{\circ}$ LU, 101.490° BT
8	Rupat Utara	Tanjung Medang	Paling Utara	$\pm 1.900^{\circ}$ LU, 101.400° BT
9	Bengkalis	Bengkalis Kota	Tengah Pulau	$\pm 1.480^{\circ}$ LU, 102.120° BT
10	Bantan	Selat Baru	Timur Laut	$\pm 1.550^{\circ}$ LU, 102.230° BT
11	Bandar Laksamana	Parit 1	Tenggara	$\pm 1.110^{\circ}$ LU, 102.200° BT

Tabel 2. 2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

BAB III

DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG KEPENDUDUKAN

1. Komposisi Umur dan Jenis Kelamin

Data kependudukan digunakan untuk melihat tren dinamika penduduk sebagai bahan monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Dinamika penduduk dapat dilihat dari perubahan struktur dan komposisinya menurut umur dan jenis kelamin. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2024 adalah 591.800 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 302.838 jiwa dan perempuan 288.962 jiwa.

Jika pembahasan difokuskan pada perempuan, terlihat bahwa pada kelompok usia 55 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Misalnya, pada kelompok usia 75 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan mencapai 3.386 jiwa, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berjumlah 3.025 jiwa. Hal ini secara kasat mata menunjukkan bahwa perempuan memiliki angka harapan hidup lebih tinggi dibandingkan laki-laki sehingga lebih banyak yang mencapai usia lanjut.

Sajian selengkapnya tentang penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kab. Bengkalis Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribuan)	Penduduk (Perempuan) (Ribuan)	Total (Jiwa)
0-4	28790	27542	56332
5-9	28807	27168	55975
10-14	25334	24039	49373
15-19	22955	21910	44865
20-24	21540	20432	41972
25-29	25119	23319	48438
30-34	23917	22299	46216
35-39	22026	21753	43779
40-44	21318	21270	42588
45-49	21085	19880	40965
50-54	18348	17413	35761
55-59	15804	14368	30172
60-64	11982	11371	23353
65-69	8191	7949	16140
70-74	4597	4863	9460
75+	3025	3386	6411
Jumlah/Total	302838	288962	591800

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis

Angka ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin rendah angka dependency ratio maka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Rendahnya angka ketergantungan menunjukkan tingginya proporsi penduduk usia produktif relatif terhadap penduduk usia belum/tidak produktif. Sehingga secara ekonomi akan semakin besar peluang untuk menghasilkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin rendahnya dependency ratio juga menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi sehingga nilai tambah per kapita akan semakin tinggi, hal ini berarti peningkatan kesejahteraan penduduk.

Jika dilihat berdasarkan kelompok usia, pada usia muda angka ketergantungan penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan, sedangkan pada usia tua angka ketergantungan perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini berhubungan dengan rasio jenis kelamin, di mana pada usia muda rasio jenis kelamin berada di atas angka 100 (laki-laki lebih banyak), sedangkan pada usia tua rasio jenis kelamin berada di bawah angka 100 (perempuan lebih banyak). Tingginya angka ketergantungan perempuan pada usia tua akan berdampak pada fasilitas sosial ekonomi yang dibutuhkan penduduk usia lanjut. Jaminan sosial, fasilitas kesehatan, serta fasilitas sosial ekonomi lainnya untuk lansia harus diprioritaskan pada perempuan.

2. Komposisi Menurut Wajib KTP, Akta dan KIA.

Seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki identitas kewarganegaraan, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan data resmi dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, persentase penduduk yang telah memiliki KTP Elektronik (E-KTP) mencapai **97,60%** Meskipun belum mencapai angka sempurna, capaian ini sangat tinggi dan mendekati target 100%, menandakan efektivitas pelaksanaan administrasi kependudukan di wilayah ini.

3. Umur Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama wanita erat hubungannya dengan fertilitas. Semakin muda usia perkawinan pertama (mendekati usia haid pertama), semakin

panjang masa reproduksinya. Hal ini berarti semakin besar peluang seorang wanita untuk hamil dan melahirkan.

Usia yang dianjurkan bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan pertama adalah 21 tahun. Sebagian besar perempuan usia 10 tahun ke atas yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Bengkalis melangsungkan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas. Meskipun demikian, masih terdapat perempuan yang menikah pertama kali di bawah usia 21 tahun. Dilihat dari wilayah tempat tinggal, persentase perempuan yang kawin pertama di bawah usia 21 tahun lebih banyak di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan di perdesaan dibandingkan perkotaan.

4. Anak Lahir Hidup, Anak Masih Hidup, dan Anak Sudah Meninggal

Anak Lahir Hidup (ALH) adalah semua anak yang pada waktu lahir memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti adanya detak jantung, bernafas, menangis, atau tanda-tanda kehidupan lainnya.

Anak Masih Hidup adalah semua anak yang dilahirkan hidup dan pada saat pencacahan masih hidup, baik tinggal bersama orang tuanya maupun yang tinggal terpisah.

Anak Sudah Meninggal adalah anak kandung yang sudah meninggal, tidak termasuk anak yang lahir mati.

5. Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu sarana pengendalian jumlah penduduk, terutama untuk menekan angka kelahiran yang pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang membawa dampak pada desentralisasi kebijakan kependudukan, pelaksanaan program KB mengalami banyak tantangan.

Meskipun telah dilakukan revitalisasi program KB nasional sejak 2009, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Data KB dikumpulkan antara lain melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk memperoleh informasi penggunaan alat kontrasepsi oleh perempuan pernah kawin (kawin, cerai hidup, cerai mati) berusia 15 tahun ke atas, yakni kelompok usia yang berpotensi hamil dan melahirkan.

Tabel 3. 2 Jumlah Peserta KB Aktif Yang Dilayani Oleh Faskes Pemerintah Per Kecamatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN										METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
				SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEK TOMI	TUBEK TOMI	MAL	TOTAL	%	
1	2	3	4=12+13	5	6	7	8	9	10	11	12	13=Σ(4-11)	14	15
01	Bengkalis	11448	7045	3319	1319	1508	444	109	2	297	4	7002	61.16	43
02	Bantan	9207	6943	3420	1652	730	703	146	26	239	3	6919	75.15	24
03	Bukit Batu	3329	2312	711	756	248	216	129	3	210	3	2276	68.37	36
04	Mandau	21836	15738	6518	2299	4084	604	992	24	632	10	15163	69.44	575
05	Rupat	7005	4923	3290	733	175	545	44	10	69	4	4870	69.52	53
06	Rupat Utara	3336	2542	1578	368	89	447	19	1	34	1	2537	76.05	5
07	Siak Kecil	5574	4178	2625	513	196	579	107	21	122	0	4163	74.69	15
08	Pinggir	11485	8939	4392	2111	1152	818	181	5	210	1	8870	77.23	69
09	Bandar Laksamana	2738	2155	1052	615	174	209	28	1	67	1	2147	78.41	8
10	Talang Muandau	5277	3861	2231	518	266	674	36	3	84	0	3812	72.24	49
11	Bathin Solapan	16325	12190	5399	2614	1976	1150	541	8	461	3	12152	74.44	38
JUMLAH TOTAL		97560	70826	34535	13498	10598	6389	2332	104	2425	30	69911	71.66	915

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur (PUS) yang pada saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi.

Jika dilihat per metode kontrasepsi modern, jumlah peserta KB terendah berasal dari metode Amenore Laktasi (MAL) yang hanya diikuti oleh 30 orang. Sedangkan terbanyak dengan metode suntik yaitu 34.535, Data ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KB di Kabupaten Bengkalis masih didominasi oleh perempuan, sementara partisipasi laki-laki masih relatif rendah.

Jumlah keseluruhan peserta KB aktif adalah 70.826 dengan peserta dari Kecamatan Mandau terbanyak dengan peserta KB aktif berjumlah 15.738 sedangkan yang paling sedikit dari Kecamatan Bandar Laksamana berjumlah 2.155.

Tabel 3. 3 Data Anak Memiliki Akta dan KIA Kab. Bengkalis tahun 2024

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI MEMILIKI AKTA	PEREMPUAN MEMILIKI AKTA	JUMLAH MEMILIKI AKTA	LAKI-LAKI MEMILIKI KIA	PEREMPUAN MEMILIKI KIA	JUMLAH MEMILIKI KIA	KEPALA KELUARGA PEREMPUAN
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I	BENGKALIS	14.540	13.455	27.995	11.467	10.814	22.281	5.530
II	BANTAN	6.942	6.379	13.321	5.834	5.463	11.297	2.777
III	BUKIT BATU	3.619	3.362	6.981	2.772	2.587	5.359	1.379
IV	MANDAU	26.949	25.483	52.432	18.571	17.958	36.529	8.238
V	RUPAT	6.612	6.277	12.889	4.570	4.298	8.868	2.187
VI	RUPAT UTARA	2.952	2.886	5.838	2.262	2.206	4.468	851
VII	SIK KECIL	4.731	4.363	9.094	3.694	3.386	7.080	1.428
VIII	PINGGIR	12.024	11.407	23.431	7.403	7.159	14.562	3.792
IX	BANDAR LAKSAMANA	3.420	3.102	6.522	2.398	2.256	4.654	861
X	TALANG MUANDAU	5.723	5.416	11.139	3.890	3.830	7.720	1.200
XI	BATHIN SOLAPAN	20.954	19.269	40.223	11.325	10.602	21.927	5.268

Sumber: Disdukcapil Kab. Bengkalis

Tabel 3. 4 Data Usia Pengantin tahun 2023

Sumber: Pengadilan Agama Bengkalis

No	BULAN	Jumlah Nikah	Usia Pengantin					
			Laki - Laki			Wanita		
			- 19	19 - 21	21+	- 19	19 - 21	21+
1	JANUARI	367	1	29	337	5	82	280
2	FEBRUARI	344	1	31	312	4	75	265
3	MARET	246	0	32	214	5	62	179
4	APRIL	64	0	8	56	3	11	50
5	MEI	426	2	32	392	6	99	321
6	JUNI	259	2	33	224	7	75	177
7	JULI	417	3	36	378	5	89	323
8	AGUSTUS	231	0	28	203	3	58	170
9	SEPTEMBER	326	1	33	292	3	75	248
10	OKTOBER	313	1	25	287	3	86	224
11	NOVEMBER	272	2	14	256	2	55	215
12	DESEMBER	355	0	33	322	5	83	267
	TOTAL	3620	13	334	3273	51	850	2719

Tabel 3. 5 Data usia Pengantin 2024

No	BULAN	Jumlah Nikah	Usia Pengantin					
			Laki - Laki			Wanita		
			- 19	19 - 21	21+	- 19	19 - 21	21+
1	JANUARI	345	1	23	321	7	70	268
2	FEBRUARI	372	1	39	332	7	104	261
3	MARET	103	2	13	88	8	27	68
4	APRIL	245	1	13	231	3	47	195
5	MEI	300	1	37	262	1	71	228
6	JUNI	425	2	53	370	6	117	302
7	JULI	269	2	16	251	3	47	219
8	AGUSTUS	304	2	45	257	5	84	215
9	SEPTEMBER	265	0	14	251	2	66	197
10	OKTOBER	318	2	23	293	4	76	238
11	NOVEMBER	254	1	24	229	7	67	180
12	DESEMBER	351	2	13	336	5	65	281
	TOTAL	3551	17	313	3221	58	841	2652

Sumber: Pengadilan Agama Bengkulu

BAB IV

DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG KEPENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan yang dicapai. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945 dan GBHN yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa.

Setiap penduduk Indonesia berhak atas kehidupan yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai kehidupan yang layak tersebut adalah melalui pendidikan, dengan pencapaian pendidikan bagi semua lapisan masyarakat (education for all) bagi tua dan muda, miskin maupun kaya, dan laki-laki maupun perempuan.

Salah satu pilar pembangunan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan dengan indikator antara lain : Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Buta Aksara/Angka Melek Aksara, dimana ketimpangan gender dapat terlihat dari representasi perempuan dan laki-laki pada data indikator tersebut.

1. Partisipasi Sekolah

Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan nasional di Indonesia menempatkan penduduk sebagai SDM negara baik menjadi subjek maupun objek pembangunan. Indonesia sebagai negara demokrasi yang dibangun dari, oleh, dan untuk rakyat sehingga segala urusan pemerintahan dan pembangunan akan melibatkan rakyat sebagai sumber daya manusia. Sehingga Indonesia tidak hanya negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas.

Oleh karena itu, dalam rangka menunjang kapasitas SDM yakni rakyat Indonesia sebagai pelaku pembangunan nasional, maka diperlukan penempatan rakyat sebagai objek pembangunan. Proses untuk menghasilkan SDM yang berkualitas bermula melalui pendidikan. Oleh karena itu, partisipasi sekolah menjadi indikator yang penting untuk memantau proses berjalannya pendidikan guna

memastikan penduduk mendapatkan haknya mengenyam pendidikan yang berkualitas.

Partisipasi sekolah diukur melalui tiga indikator, yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Ketiga indikator tersebut memiliki esensi yang berbeda. APS menitikberatkan pada partisipasi anak usia sekolah, sedangkan APK dan APM memberikan fokus cakupan partisipasi sekolah dari sudut pandang jenjang pendidikan. Ketiga indikator ini dijadikan salah satu tolak ukur pemerintah dalam menyusun perencanaan dalam menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan memperoleh generasi penerus bangsa yang berkualitas agar kontribusinya dalam pembangunan bisa berdampak positif dalam meningkatkan produktivitas negara.

Tabel 4. 1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024

Partisipasi Sekolah	2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
Tidak/belum pernah bersekolah	5,40	5,64	5,52	4,51	3,59	4,06
Masih sekolah SD/ sederajat	13,58	15,05	14,30	12,75	13,95	13,34
Masih sekolah SMP/ sederajat	6,43	6,61	6,52	6,38	6,06	6,22
Masih sekolah SMA/ sederajat	4,78	4,39	4,59	5,15	5,79	5,46
Masih sekolah Perguruan Tinggi	2,76	2,75	2,76	2,96	2,95	2,96
Tidak bersekolah lagi	67,05	65,55	66,32	68,24	67,66	67,96

Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2023 dan 2024 (Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret)

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa persentase penduduk 5 tahun ke atas yang belum/tidak pernah bersekolah mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 5,52 persen menjadi 4,06 persen di tahun 2024. Adanya fenomena penurunan ini salah satunya kemungkinan karena adanya syarat masuk SD saat ini diprioritaskan berumur 7 tahun atau paling rendah 6 tahun sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah tidak terlalu berbeda antara laki-laki dan perempuan, persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang masih bersekolah di Perguruan Tinggi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, dengan

persentase penduduk laki- laki yang berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah Perguruan Tinggi adalah 2,96 persen dan persentase penduduk perempuan yang berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah Perguruan Tinggi adalah 2,95 persen, hanya berbeda 0,01 persen.

Tabel 4. 2 Persentase Penduduk Berumur 7-23 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024

Partisipasi Sekolah	2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
Tidak/belum pernah bersekolah	0,61	0,59	0,60	NA	NA	NA
Masih sekolah SD/ sederajat	38,70	41,42	40,03	36,81	39,82	38,28
Masih sekolah SMP/ sederajat	19,50	19,97	19,73	19,17	18,23	18,71
Masih sekolah SMA/ sederajat	14,29	12,65	13,49	15,23	16,99	16,10
Masih sekolah Perguruan Tinggi	5,94	6,94	6,43	7,03	5,14	6,11
Tidak bersekolah lagi	20,96	18,44	19,72	21,58	19,60	20,61

Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2023 dan 2024 (Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret)

Jika melihat berdasarkan rentang usia sekolah 7-23 tahun sebagai usia yang masih aktif melakukan kegiatan bersekolah pada Tabel 4.2, persentase yang masih bersekolah sebesar 79,20 persen dan tidak bersekolah lagi sebesar 20,61 persen di tahun 2024. Artinya, sebanyak 79 s.d. 80 orang dari 100 orang penduduk Kabupaten Bengkalis yang berusia 7-23 tahun masih bersekolah pada jenjang SD ke atas dan terdapat 20 s.d. 21 orang dari 100 orang penduduk Kabupaten Bengkalis yang berusia 7-23 tahun tidak bersekolah lagi. Pada tahun 2024, penduduk bersekolah di Kabupaten Bengkalis di dominasi pada jenjang pendidikan dasar atau SD/ Sederajat, yakni sebesar 38,28 persen, diikuti jenjang SMP/ Sederajat sebesar 18,71 persen, jenjang SMA/ Sederajat 16,10 persen dan yang masih bersekolah di Perguruan Tinggi sebesar 6,11 persen. Sementara Penduduk yang tidak bersekolah lagi di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 19,72 persen pada tahun 2023 menjadi 20,61 persen pada tahun 2024. Peningkatan persentase penduduk yang berumur 7- 23 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi bisa dipengaruhi oleh

penduduk berumur 7-23 tahun ke atas yang sudah berhenti sekolah ataupun lulus dari Perguruan Tinggi, dengan persentase penduduk berumur 7-23 tahun ke atas yang masih bersekolah di Perguruan Tinggi mengalami penurunan dari tahun 2023. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk berumur 7-23 tahun ke atas untuk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki pada tahun 2024. Persentase perempuan berumur 7-23 tahun ke atas yang masih bersekolah adalah sebesar 80,18 persen, lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki berumur 7-23 tahun ke atas yang masih bersekolah adalah sebesar 78,24 persen.

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar kesempatan individu memperoleh pendidikan. APS dibedakan menurut kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan. Indikator ini tidak mempertimbangkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh individu.

Tabel 4. 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024

Kelompok Umur (Tahun)	2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
7-12	99,72	98,59	99,15	100,00	99,47	99,73
13-15	95,59	94,64	95,12	95,96	98,51	97,10
15-18	81,06	82,21	81,60	74,68	82,07	78,66

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan 2024

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa APS pada kelompok umur 7-12 tahun untuk laki-laki sudah mencapai 100 dan untuk perempuan hampir mencapai 100 persen dengan APS sebesar 99,47 persen. Pada tahun 2024 APS pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2023, namun turun pada kelompok umur 16-18 tahun. APS untuk kelompok umur 16-18 tahun pada tahun 2023 adalah 81,60 persen dan menjadi 78,66 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa adanya peluang ekonomi yang membuat peserta didik memiliki pilihan untuk melanjutkan sekolah atau berhenti untuk bekerja pada usia 16-18 tahun. Selain itu, umumnya orang tua cenderung mengusahakan anaknya untuk bersekolah minimum pendidikan dasar guna memberikan bekal ilmu dan pengetahuan (seperti membaca, menulis, dan menghitung) untuk kehidupan

dewasa nanti sehingga APS untuk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun tetap meningkat.

b. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM digunakan sebagai indikator yang mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Hal ini karena APM mengindikasikan partisipasi sekolah yang tepat waktu, yaitu jenjang SD/Sederajat (7-12 tahun), SMP/Sederajat (13-15 tahun), dan SM/Sederajat (16-18 tahun). APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Oleh karena itu, nilai APM kurang dari atau sama di bawah nilai APK karena APK ikut memperhitungkan anak yang berusia di luar rentang pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar nilai beda APK dan APM. Artinya, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar lebih cenderung tepat waktu dibandingkan jenjang pendidikan menengah.

Tabel 4. 4 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024

Jenjang Pendidikan	2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
SD Sederajat	99,72	98,59	99,15	98,81	97,90	98,35
SMP Sederajat	85,23	84,27	84,75	81,57	91,29	85,92
SMA Sederajat	65,66	64,91	65,31	62,96	76,03	69,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan 2024

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa pada tahun 2024 APM pada jenjang pendidikan SD/Sederajat mengalami penurunan, sedangkan APM pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat mengalami kenaikan. Sama halnya dengan pola APK, pola APM juga menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Pada tahun 2024 nilai APM pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 98,35 persen, turun menjadi 85,92 persen pada jenjang SMP/Sederajat dan kembali turun menjadi 69,99 persen pada jenjang SMA/Sederajat. Hal tersebut

menunjukkan bahwa semakin besar persentase penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD/Sederajat. Nilai APM pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 98,35 persen menunjukkan bahwa 98-99 dari 100 penduduk Kabupaten Bengkalis yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada Tahun 2024 APM Perempuan lebih besar dibanding laki-laki pada jenjang pendidikan SMP/ Sederajat dan SMA Sederajat, namun lebih kecil dibanding laki-laki pada jenjang pendidikan SD/ Sederajat. Hal ini menunjukkan penduduk laki-laki di Kabupaten Bengkalis lebih banyak yang bersekolah tidak tepat waktu dibanding perempuan pada tahun 2024.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tertentu) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan tertentu. Ukuran ini juga menggambarkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan di suatu negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu (UNESCO, 2009). Indikator ini juga menjadi indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Nilai APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan adanya peserta didik di atas dan di bawah umur sebagai indikasi terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah dan pengulangan kelas. Pemerintah menjadikan APK sebagai salah satu indikator pendidikan yang senantiasa ditinjau capaiannya indikator guna mencapai target RPJMN. Dalam naskah RPJMN 2020-2024, hanya APK jenjang perguruan tinggi yang disebutkan sebagai indikator dari agenda pembangunan “terpenuhinya pelayanan dasar”.

Beberapa faktor dapat menyebabkan fenomena ini, seperti siswa yang masuk sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang sesuai atau siswa yang usianya melebihi usia masuk sekolah pada umumnya. APK biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan dalam

rangka meningkatkan kesempatan bagi orang untuk belajar, terutama dengan mempertimbangkan keberhasilan program wajib belajar.

Tabel 4. 5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024

Jenjang Pendidikan	2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
SD Sederajat	106,13	108,80	107,49	102,87	103,14	103,01
SMP Sederajat	98,73	97,72	98,22	88,20	99,10	93,09
SMA Sederajat	80,95	81,34	81,14	97,05	89,77	93,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan 2024

Pada Tabel 4.5 di atas terlihat bahwa capaian APK Tahun 2024 mengalami kenaikan pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat, namun mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat. APK tertinggi berada pada jenjang pendidikan SD/Sederajat pada tahun 2024, dengan nilai APK sebesar 103,01 persen, turun sebesar 4,48 persen jika dibandingkan tahun 2023. Tingginya APK pada jenjang pendidikan SD/Sederajat yang berada di atas angka 100 persen menunjukkan masih banyak murid yang masih menduduki bangku sekolah pada jenjang pendidikan SD/Sederajat yang seharusnya berdasarkan umur sudah tidak menduduki/belum menduduki SD/Sederajat, walaupun sudah menurun dibandingkan tahun 2023. Peningkatan terbesar dibanding Tahun 2023 terjadi pada APK SMA/Sederajat, dimana APK untuk SMA/Sederajat pada tahun 2023 adalah sebesar 81,14 persen yang kemudian naik menjadi 93,13 persen pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 11,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak siswa yang bersekolah SMA/Sederajat sesuai dengan umurnya, tidak terlalu dini ataupun terlambat mendaftar.

2. Angka Melek Huruf

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi. Dengan kemampuan tersebut seseorang dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya dan berujung pada peningkatan kualitas hidup diri, keluarga bahkan negaranya di berbagai bidang kehidupan. Indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). Sejak 10 tahun terakhir, AMH digunakan sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki

kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkan AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Tabel 4. 6 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024

Jenjang Pendidikan	2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
15 - 24	100,00	100,00	100,00	99,68	100,00	99,83
15 - 59	100,00	100,00	100,00	99,76	100,00	99,88
15 +	99,31	99,15	99,23	98,99	99,01	99,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan 2024

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat perbandingan capaian AMH untuk setiap kelompok umur di Kabupaten Bengkalis. Adapun capaian AMH pada tahun 2024 hampir mencapai 100 persen untuk seluruh golongan umur, kecuali pada golongan umur 15 tahun ke atas, hal tersebut disebabkan karena pada kelompok umur 15 tahun ke atas juga mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau banyak yang sudah lupa. Selain itu, program keaksaraan fungsional juga hanya dikhususkan bagi penduduk usia 15-59 tahun. Angka 99,00 persen pada kelompok umur 15 tahun ke atas dapat diartikan bahwa terdapat 99 orang dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas telah memiliki kemampuan keaksaraan seperti membaca dan menulis.

3. Angka Putus Sekolah

Tabel 4. 7 Data Angka Putus Sekolah tahun 2024 Perkecamatan Kab. Bengkalis

NO	KECAMATAN	JENJANG	
		SD	SMP
1	Bengkalis	10	24
2	Bantan	36	26
3	Bukit Batu	24	0
4	Siak Kecil	11	12
5	Rupat	24	0
6	Rupat Utara	26	0
7	Mandau	0	18
8	Pinggir	0	17
10	Bathin Solapan	29	6
11	Talang Muandau	24	0
JUMLAH		228	161

Sumber Dinas Pendidikan Tahun 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa angka putus sekolah SD adalah 228, angka putus sekolah SMP adalah 161. Hal ini dapat dijelaskan tingkat putus sekolah SD lebih banyak dibandingkan dengan tingkat putus sekolah SMP.

4. Angka Sertifikasi Guru

Tabel 4. 8 Data Angka Sertifikasi Guru tahun 2024 Perkecamatan Kab. Bengkalis

NO	KECAMATAN	JENJANG		
		TK	SD	SMP
1	Bandar Laksamana	59	155	43
2	Bantan	138	342	118
3	Bathin Solapan	87	732	265
4	Bengkalis	224	805	321
5	Bukit Batu	62	216	86
6	Mandau	212	1099	562
7	Pinggir	89	430	283
8	Rupat	67	379	149
9	Rupat Utara	33	137	54
10	Siak Kecil	72	215	90
11	Talang Muandau	30	229	81
JUMLAH		1073	4739	2052

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab. Bengkalis 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa guru TK yang telah memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi) sebanyak 1071 orang, sedangkan guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi) sebanyak 4739 orang. Dan guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi) sebanyak 2052 orang. Hal ini dapat dijelaskan Guru SMP di Kab. Bengkalis lebih banyak memiliki sertifikat

pendidik (sertifikasi) sedangkankan guru TK paling sedikit yang menerima sertifikat pendidik (sertifikasi).

5. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024. Indikator ini menggambarkan tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah serta kualitas sumber daya manusia. RLS yang tinggi menunjukkan sistem pendidikan di suatu wilayah sudah berjalan semakin baik (UNESCO, 2009). Terlebih lagi, pada penyusunan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai ukuran capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup, indikator RLS ini masuk dalam indikator penyusun dimensi pengetahuan (knowledge). Rata- Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, tidak termasuk tahun yang dihabiskan untuk penduduk yang mengulang karena tidak naik kelas.

Tabel 4. 9 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bengkalis, 2023 dan 2024

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah			Harapan Lama Sekolah		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
2023	10,01	9,43	9,73	13,30	13,97	13,34
2024	10,02	9,44	9,74	13,40	13,98	13,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan 2024, diolah

BAB V

DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG KESEHATAN

Informasi kesehatan sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan ini sebagai program berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh pendekatan, kebijakan, dan strategi yang tepat sasaran, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, maka upaya-upaya pembangunan kesehatan diselenggarakan secara terintegrasi mulai dari perencanaan sampai ke tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program. Dukungan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat dapat menentukan pengambilan keputusan kesehatan kedepannya.

Pembangunan Kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, leluasa, dan murah. Pembangunan kesehatan mewujudkan keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Secara nasional, pembangunan kesehatan telah berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan penduduk.

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Pembangunan di Kabupaten Bengkalis khususnya Pembangunan Kesehatan juga telah diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

1. Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 5. 1 Jumlah tenaga kesehatan di RSUD Bengkalis Tahun 2016 – 2023 (Orang)

Jumlah tenaga kesehatan di RSUD Bengkalis (Orang)	
Tahun	
(1)	(2)
2023	404
2022	412

2021	398
2020	406
2019	380
2018	254
2017	265
2016	267

Sumber : RSUD Bengkalis

Berdasarkan Tabel 5.1, jumlah tenaga kesehatan di RSUD Bengkalis pada tahun 2023 tercatat sebanyak 404 orang, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 412 orang. Fluktuasi jumlah tenaga kesehatan terlihat cukup jelas dalam periode 2016–2023. Pada tahun 2016 jumlah tenaga kesehatan tercatat 267 orang, kemudian meningkat menjadi 265 orang pada tahun 2017, dan melonjak signifikan pada tahun 2018 menjadi 254 orang, lalu kembali naik menjadi 380 orang pada tahun 2019.

Tahun 2020 jumlahnya meningkat lagi menjadi 406 orang, meskipun pada 2021 mengalami penurunan menjadi 398 orang. Secara keseluruhan, jumlah tenaga kesehatan di RSUD Bengkalis selama periode tersebut menunjukkan tren meningkat, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebutuhan pelayanan kesehatan, rekrutmen tenaga medis baru, serta kebijakan penempatan dan mutasi pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

Tabel 5. 2 Jumlah dokter di RSUD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2023 (Orang)

Tahun	Jumlah dokter di RSUD Kabupaten Bengkalis (Orang)
⁽¹⁾ 2023	⁽²⁾ 55
2022	60
2021	57
2020	51
2019	53
2018	42
2017	43
2016	45

Sumber : RSUD Bengkalis

Berdasarkan Tabel 5.2, jumlah dokter di RSUD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 tercatat sebanyak 55 orang, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 60 orang. Selama periode 2016–2023, jumlah dokter mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2016, jumlah dokter tercatat 45 orang dan sedikit menurun menjadi 43 orang pada 2017, kemudian meningkat menjadi 42 orang pada 2018. Tahun 2019 jumlah dokter bertambah menjadi 53 orang, namun kembali menurun menjadi 51 orang pada 2020. Pada 2021 terjadi kenaikan menjadi 57 orang, sebelum mencapai puncaknya pada 2022 dengan 60 orang. Meski pada 2023 kembali turun menjadi 55 orang, secara umum tren jumlah dokter selama periode tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan awal periode, yang mencerminkan adanya upaya penambahan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkalis

Tabel 5. 3 Jumlah tempat tidur RSUD Bengkalis Tahun 2016 – 2022 (Tempat Tidur)

Tahun	Jumlah tempat tidur RSUD Bengkalis (Tempat Tidur)
(1)	(2)
2023	207
2022	207
2021	202
2020	231
2019	167
2018	167
2017	167
2016	164

Sumber : RSUD Bengkalis

Berdasarkan Tabel 5.3, jumlah tempat tidur di RSUD Bengkalis pada periode 2016–2023 mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah tempat tidur tercatat sebanyak 164 unit, yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 167 unit pada tahun 2017 dan bertahan stabil hingga 2019. Lonjakan besar terjadi pada tahun 2020 dengan peningkatan jumlah tempat tidur menjadi 231 unit, yang kemungkinan besar berkaitan dengan penyesuaian kapasitas pelayanan akibat kebutuhan mendesak, seperti penanganan pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021 jumlah tempat tidur menurun menjadi 202 unit, diikuti dengan peningkatan kecil pada tahun 2022 menjadi 207 unit dan jumlah tersebut tetap dipertahankan hingga tahun 2023. Secara keseluruhan, data ini

menunjukkan adanya upaya penyesuaian kapasitas tempat tidur sesuai kebutuhan pelayanan dan kondisi kesehatan masyarakat. Peningkatan jumlah tempat tidur dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan awal periode menunjukkan bahwa RSUD Bengkalis berkomitmen memperluas daya tampung dan meningkatkan kualitas pelayanan rawat inap, meskipun terdapat fluktuasi yang menyesuaikan situasi dan kebutuhan fasilitas

Tabel 5. 4Jumlah pasien rawat inap, rawat jalan dan instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Bengkalis Tahun 2016 – 2023

Tahun	Rawat inap (Orang)	Rawat jalan (Orang)	Instalasi gawat darurat (Orang)	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2023	850	6.700	1.580	9.130
2022	8.861	60.832	15.190	84.883
2021	7.745	47.557	11.824	67.126
2020	8.060	5.380	11.542	24.982
2019	8.953	53.383	15.451	77.787
2018	8.955	53.399	13.347	75.701
2017	8.706	45.149	12.626	66.481
2016	12.565	12.664	13.128	38.357

Sumber : RSUD Bengkalis

Berdasarkan Tabel 5.4, jumlah pasien rawat inap, rawat jalan, dan instalasi gawat darurat (IGD) di RSUD Bengkalis pada periode 2016–2023 menunjukkan pola fluktuasi yang cukup mencolok, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan pelayanan rumah sakit dan kondisi kesehatan masyarakat, terutama pada masa pandemi. Pada tahun 2016, jumlah pasien rawat inap tercatat 12.565 orang, rawat jalan 12.664 orang, dan IGD 13.128 orang, sehingga total pasien yang dilayani mencapai 38.357 orang. Jumlah ini meningkat signifikan pada 2017 dengan total 66.481 pasien, terutama disumbang oleh lonjakan pasien rawat jalan yang mencapai 45.149 orang. Tren peningkatan berlanjut hingga 2019, dengan jumlah pasien rawat jalan di atas 53 ribu orang dan pasien rawat inap sekitar 8.9 ribu orang, sehingga total pasien pada tahun 2019 mencapai 77.787 orang. Memasuki tahun 2020, terjadi penurunan drastis pasien rawat jalan menjadi hanya 5.380 orang,

meskipun jumlah rawat inap dan IGD tidak turun signifikan. Penurunan tajam ini sangat mungkin terkait pembatasan layanan akibat pandemi COVID-19, di mana kunjungan rawat jalan dibatasi untuk menghindari penularan. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan tren pemulihan, dengan pasien rawat jalan kembali meningkat hingga 60.832 orang pada 2022, diikuti rawat inap sebanyak 8.861 orang, serta IGD sebanyak 15.190 orang. Namun, pada tahun 2023, jumlah pasien rawat inap, rawat jalan, dan IGD mengalami penurunan ekstrem menjadi hanya 850 pasien rawat inap, 6.700 pasien rawat jalan, dan 1.580 pasien IGD, sehingga total layanan hanya 9.130 pasien. Angka ini merupakan yang terendah dalam delapan tahun terakhir dan perlu dianalisis lebih lanjut, apakah disebabkan oleh penyesuaian kebijakan pelayanan, beralihnya pasien ke fasilitas kesehatan lain, atau faktor eksternal lainnya

Tabel 5. 5Jumlah bayi lahir, kematian bayi dan bayi gizi buruk di RSUD Bengkalis Tahun 2016 – 2022 (Orang)

Tahun	Bayi Lahir	Kematian Bayi <48 jam	Kematian Bayi >48 jam	Bayi Gizi Buruk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2023	1.403	24		0
2022	1.268	8	12	3
2021	1.407	16	12	0
2019	1.407	13	11	1
2018	1.259	7	11	0
2017	1.001	5	3	0
2016	908	3	2	0

Sumber : RSUD Bengkalis

Berdasarkan Tabel 5.5, jumlah bayi lahir, kematian bayi, dan bayi gizi buruk di RSUD Bengkalis selama periode 2016–2023 menunjukkan tren yang bervariasi, dengan fluktuasi pada angka kelahiran dan kematian bayi, serta jumlah kasus gizi buruk yang relatif rendah. Pada tahun 2016, tercatat 908 bayi lahir dengan kematian bayi kurang dari 48 jam sebanyak 3 kasus dan kematian bayi lebih dari 48 jam sebanyak 2 kasus. Tidak ditemukan kasus bayi gizi buruk pada tahun ini. Tahun 2017 menunjukkan peningkatan kelahiran menjadi 1.001 bayi, dengan penurunan jumlah kematian bayi menjadi 5 kasus untuk <48 jam dan 3 kasus untuk >48 jam, serta tidak ada kasus gizi buruk. Tahun 2018, jumlah kelahiran meningkat signifikan menjadi 1.259 bayi, sementara kematian bayi <48 jam menurun menjadi 7 kasus dan kematian

>48 jam tetap di angka 11 kasus. Tidak ditemukan kasus gizi buruk pada tahun ini. Pada 2019, jumlah kelahiran kembali naik menjadi 1.407 bayi, dengan kematian bayi <48 jam tercatat 13 kasus dan kematian >48 jam sebanyak 11 kasus, serta ditemukan 1 kasus bayi gizi buruk. Memasuki 2020, data tidak tercatat dalam tabel, namun pada 2021, jumlah kelahiran tetap tinggi yaitu 1.407 bayi, dengan kematian bayi <48 jam sebanyak 16 kasus dan kematian bayi >48 jam 12 kasus, tanpa adanya kasus gizi buruk. Tahun 2022 menunjukkan penurunan kelahiran menjadi 1.268 bayi, dengan kematian bayi <48 jam sebanyak 8 kasus, kematian bayi >48 jam 12 kasus, serta 3 kasus bayi gizi buruk. Pada tahun 2023, jumlah kelahiran tercatat 1.403 bayi, namun hanya terdapat 24 kasus kematian bayi yang semuanya tercatat dalam kategori <48 jam, sementara kategori >48 jam dan gizi buruk tidak memiliki kasus. Angka kematian bayi <48 jam pada 2023 ini adalah yang tertinggi selama periode pengamatan, meskipun total kelahiran tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa meskipun jumlah kelahiran di RSUD Bengkalis relatif stabil dalam kisaran 900–1.400 bayi per tahun, angka kematian bayi mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dengan dominasi kematian pada periode <48 jam setelah kelahiran. Kasus bayi gizi buruk tercatat sangat jarang, hanya muncul pada tahun-tahun tertentu

Tabel 5. 6 Indeks kepuasan masyarakat (IKM), Status akreditasi, dan Cost Recovery Rate RSUD Bengkalis Tahun 2016 – 2022

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Status akreditasi rumah sakit	Cost Recovery Rate (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2023	91,19	Paripurna	43,19
2022	92,35	Paripurna	44
2021	77,11	Paripurna	33,29
2020	87,72	Paripurna	37,53
2019	69,63	Paripurna	29,81
2018	81,25	Paripurna	47,42
2017	88,33	Paripurna	24,75
2016	78,15	Belum Terakreditasi	32,45

Sumber : RSUD Bengkalis

Berdasarkan Tabel 5.6, perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), status akreditasi, dan Cost Recovery Rate (CRR) RSUD Bengkalis dari tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan mutu pelayanan dengan status akreditasi yang stabil pada level tertinggi, meskipun capaian efisiensi biaya dan kepuasan masyarakat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, RSUD Bengkalis belum terakreditasi, dengan IKM sebesar 78,15 dan CRR sebesar 32,45%. Tahun berikutnya, 2017, rumah sakit berhasil meraih akreditasi Paripurna yang merupakan tingkat tertinggi dengan peningkatan IKM menjadi 88,33, meskipun CRR justru turun menjadi 24,75%. Tahun 2018, IKM naik menjadi 81,25 (sedikit menurun dari tahun sebelumnya), namun CRR mengalami lonjakan signifikan menjadi 47,42%, angka tertinggi selama periode pengamatan. Status akreditasi tetap Paripurna. Tahun 2019, IKM turun tajam menjadi 69,63, diiringi penurunan CRR menjadi 29,81%, meskipun akreditasi tetap terjaga di level Paripurna. Pada 2020, terjadi pemulihan IKM menjadi 87,72 dan kenaikan CRR menjadi 37,53%. Tahun 2021, IKM mengalami penurunan cukup besar menjadi 77,11 dan CRR turun ke 33,29%, namun status akreditasi Paripurna tetap dipertahankan.

Tahun 2022, RSUD Bengkalis berhasil meningkatkan IKM menjadi 92,35 capaian tertinggi selama periode 2016–2023 dengan CRR 44%, menandakan peningkatan kualitas layanan sekaligus perbaikan kinerja keuangan. Namun pada 2023, meskipun IKM sedikit menurun menjadi 91,19, angka tersebut masih tergolong sangat tinggi. CRR pada tahun ini berada di 43,19%, dengan status akreditasi tetap Paripurna. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa RSUD Bengkalis telah mempertahankan status akreditasi Paripurna sejak 2017, dengan IKM yang mayoritas berada di kategori baik hingga sangat baik. CRR mengalami fluktuasi tajam antar tahun, yang mengindikasikan adanya dinamika dalam pengelolaan pendapatan dan biaya operasional.

Tabel 5. 7 Jumlah pasien berdasarkan jenis jaminan Kesehatan Tahun 2016 – 2022 (Orang)

BPJS				
		PBI	NON PBI	(5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2023	132	1.020	424	1.444
2022	3.308	14.997	29.483	44.480
2021	2.878	15.823	22.956	38.779
2020	29.772	15.495	22.653	38.148
2019	4.899	7.380	40.698	48.078
2018	4.703	8.452	32.876	41.328

Berdasarkan Tabel 5.7, distribusi jumlah pasien RSUD Bengkalis menurut jenis jaminan kesehatan pada periode 2018–2023 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara pasien umum dan peserta BPJS, baik penerima bantuan iuran (PBI) maupun non-PBI. Pada tahun 2018, jumlah pasien umum tercatat 4.703 orang, sedangkan pasien BPJS PBI mencapai 8.452 orang, dan BPJS non-PBI 32.876 orang. Total pasien pengguna BPJS pada tahun tersebut sebanyak 41.328 orang. Tahun 2019 terjadi kenaikan signifikan pada pasien BPJS non-PBI menjadi 40.698 orang, meskipun pasien umum hanya 4.899 orang. Total pasien BPJS tahun 2019 tercatat sebanyak 48.078 orang.

Tahun 2020 menunjukkan lonjakan besar pada pasien umum yang mencapai 29.772 orang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sementara pasien BPJS PBI (15.495 orang) dan BPJS non-PBI (22.653 orang) relatif stabil. Total pasien BPJS pada tahun tersebut adalah 38.148 orang. Pada tahun 2021, jumlah pasien umum turun menjadi 2.878 orang, sedangkan pasien BPJS PBI meningkat menjadi 15.823 orang dan BPJS non-PBI menjadi 22.956 orang, dengan total pasien BPJS mencapai 38.779 orang. Tahun 2022 menunjukkan tren serupa, dengan pasien umum 3.308 orang, pasien BPJS PBI melonjak ke 14.997 orang, dan BPJS non-PBI meningkat signifikan menjadi 29.483 orang, sehingga total pasien BPJS mencapai 44.480 orang. Tahun 2023 memperlihatkan penurunan drastis jumlah pasien umum menjadi hanya 132 orang, sementara pasien BPJS PBI tercatat 1.020 orang dan BPJS non-PBI 424 orang, dengan total pasien BPJS sebesar 1.444 orang. Penurunan tajam ini dapat mengindikasikan adanya perubahan sistem pelayanan, kebijakan pembiayaan, atau faktor eksternal yang memengaruhi jumlah kunjungan pasien ke RSUD Bengkalis.

Lanjutan Tabel 5.7

Tahun	Jamkesda	Jampersal	In Health
(1)	(2)	(3)	(4)
2023	1		2
2022	881	0	49
2021	776	206	25
2020	606	394	38
2019	95	287	24
2018	164	152	0

Sumber : RSUD Bengkalis

Berdasarkan data lanjutan Tabel 5.7, jumlah pasien RSUD Bengkalis yang menggunakan jaminan kesehatan selain BPJS dan pasien umum yakni Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Persalinan (Jampersal), dan In Health menunjukkan fluktuasi yang cukup jelas pada periode 2018–2023. Pada tahun 2018, jumlah pasien pengguna Jamkesda tercatat sebanyak 164 orang, Jampersal 152 orang, dan tidak ada pasien yang menggunakan In Health.

Tahun 2019, jumlah pasien Jamkesda menurun signifikan menjadi 95 orang, sedangkan pasien Jampersal naik menjadi 287 orang, dan pasien In Health tercatat 24 orang. Tahun 2020 menunjukkan lonjakan cukup besar pada pasien Jamkesda menjadi 606 orang, diikuti peningkatan pasien Jampersal ke 394 orang, dan In Health menjadi 38 orang. Tahun 2021, pasien Jamkesda meningkat lagi menjadi 776 orang, meskipun pasien Jampersal turun ke 206 orang, sementara pasien In Health menurun tipis menjadi 25 orang. Pada 2022, pasien Jamkesda naik ke 881 orang, sementara Jampersal tidak mencatatkan pasien sama sekali (0), dan pasien In Health melonjak signifikan menjadi 49 orang tahun 2023, jumlah pasien Jamkesda menurun sangat tajam menjadi hanya 1 orang, Jampersal kembali tidak ada pasien, dan In Health turun drastis menjadi 2 orang.

Jika digabungkan dengan data sebelumnya, terlihat bahwa pasien dengan jaminan tambahan seperti Jamkesda, Jampersal, dan In Health hanya menyumbang porsi kecil dari total kunjungan, namun memiliki tren fluktuatif yang besar, kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan daerah, cakupan program, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Tabel 5. 8 Jumlah Bayi Lahir dan Kematian Bayi di RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2022 s.d. 2023 (Jiwa)

Elemen Data	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Jumlah Bayi Lahir Hidup	686	586
Jumlah Bayi Meninggal	15	13

Sumber : RSUD Kecamatan Mandau

Berdasarkan Tabel 5.8, jumlah bayi lahir hidup di RSUD Kecamatan Mandau mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 686 bayi lahir hidup, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut menurun menjadi 586 bayi, atau berkurang sekitar 14,58 persen. Jumlah kematian bayi juga

menunjukkan penurunan, meskipun lebih kecil secara persentase. Pada tahun 2022, jumlah kematian bayi tercatat 15 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 13 jiwa, atau berkurang 2 jiwa.

Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan ibu dan bayi, baik dari segi fasilitas maupun tenaga medis, meskipun angka kematian bayi tetap menjadi perhatian. Secara keseluruhan, walaupun total kelahiran hidup dan kematian bayi sama-sama menurun, proporsi kematian bayi terhadap jumlah kelahiran hidup perlu terus dipantau untuk memastikan upaya penurunan angka kematian bayi berjalan efektif di tahun-tahun mendatang

2. Ibu Hamil dan Bayi

Tabel 5. 9 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Ibu Hamil		
			Jumlah	K1	
				Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bengkalis	Bengkalis	1.183	1.203	101,73
2		Meskom	289	218	75,50
3		Pematang Duku	313	210	67,01
4	Bantan	Selat Baru	589	470	79,77
5		Pambang	302	198	65,56
6	Bukit Batu	Sungai Pakning	443	327	73,75
7	Bandar Laksmana	Tenggayun	362	302	83,45
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	332	272	81,83
9		Sadar Jaya	207	190	91,99
10	Bathin Solapan	Sebangar	2.461	829	33,69
11		Balai Makam	782	1.196	152,98
12	Mandau	Duri Kota	881	2.416	274,11
13		Pematang Pudu	1.305	664	50,89
14	Pinggir	Muara Basung	852	1.158	135,90
15		Pinggir	638	622	97,44
16	Talang Muandau	Serai Wangi	629	524	83,24

17	Rupat	Batu Panjang	457	390	85,40
18		Teluk Lecah	325	327	100,67
19	Rupat Utara	Tanjung Medang	327	267	81,76
Jumlah (Kab/Kota)	12.677	11.783	92,95		

Berdasarkan Tabel 5.9, cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil di Kabupaten Bengkalis tahun 2023 bervariasi antar kecamatan dan puskesmas, dengan persentase K1 (kunjungan pertama) yang menunjukkan capaian relatif terhadap jumlah ibu hamil. Beberapa puskesmas mencatat capaian K1 yang melebihi 100%, seperti Puskesmas Bengkalis (101,73%), Balai Makam (152,98%), Duri Kota (274,11%), Muara Basung (135,90%), dan Teluk Lecah (100,67%). Persentase di atas 100% ini kemungkinan disebabkan oleh kunjungan ibu hamil yang berasal dari luar wilayah kerja puskesmas, atau adanya pencatatan ibu hamil yang sudah pindah tetapi masih terdata.

Di sisi lain, terdapat puskesmas dengan cakupan K1 relatif rendah, seperti Puskesmas Pematang Duku (67,01%), Pambang (65,56%), dan Sebangar (33,69%). Rendahnya persentase ini dapat menjadi indikator kurangnya akses, hambatan geografis, atau rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilan pada trimester pertama. Secara keseluruhan, dari total 12.677 ibu hamil di Kabupaten Bengkalis, jumlah K1 tercatat 11.783 atau 92,95%. Angka ini menunjukkan bahwa secara kabupaten, target pelayanan kesehatan ibu hamil sudah mendekati cakupan penuh, namun pemerataan antar wilayah masih menjadi tantangan yang perlu ditangani.

Lanjutan Tabel 5.9

No	Kecamatan	Puskesmas	Ibu Hamil			
			K4		K6	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bengkalis	Bengkalis	1.138	96,23	1.081	91,41
2		Meskom	208	72,04	161	55,76
3		Pematang Duku	188	59,99	163	52,01
4	Bantan	Selat Baru	443	75,19	426	72,31
5		Pambang	193	63,90	173	57,28

6	Bukit Batu	Sungai Pakning	331	74,65	306	69,02
7	Bandar Laksmana	Tenggayun	317	87,60	302	83,45
8	Siak Kecil	Lubuk Muda	245	73,71	226	67,99
9		Sadar Jaya	190	91,99	171	82,79
10	Bathin Solapan	Sebangar	768	31,21	551	22,39
11		Balai Makam	1.171	149,78	1.048	134,05
12	Mandau	Duri Kota	2.381	270,14	1.245	141,26
13		Pematang Pudu	632	48,44	532	40,78
14	Pinggir	Muara Basung	1.161	136,25	1.113	130,62
15		Pinggir	572	89,61	498	78,02
16	Talang Muandau	Serai Wangi	400	63,54	239	37,97
17	Rupat	Batu Panjang	405	88,68	308	67,44
18		Teluk Lecah	329	101,29	317	97,59
19	Rupat Utara	Tanjung Medang	191	58,49	116	35,52
Jumlah (Kab/Kota)	11.263	88,85	8.976	70,81		

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis

Berdasarkan lanjutan Tabel 5.9, capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 untuk indikator K4 (kunjungan keempat) dan K6 (kunjungan keenam) menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar puskesmas. Secara keseluruhan, dari total 12.677 ibu hamil, tercatat 11.263 orang (88,85%) telah mencapai K4, sedangkan 8.976 orang (70,81%) telah melakukan K6. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil menjalani pemeriksaan kehamilan minimal empat kali sesuai standar, namun terdapat penurunan yang cukup nyata pada cakupan K6. Beberapa puskesmas mencatat cakupan K4 dan K6 di atas 100%, seperti Balai Makam (K4: 149,78%; K6: 134,05%), Duri Kota (K4: 270,14%; K6: 141,26%), Muara Basung (K4: 136,25%; K6: 130,62%), dan Teluk Lecah (K4: 101,29%; K6: 97,59%). Persentase di atas 100% kemungkinan disebabkan oleh adanya kunjungan ibu hamil dari luar wilayah kerja puskesmas atau pencatatan ganda. Sebaliknya, ada puskesmas dengan capaian relatif rendah, seperti Sebangar (K4: 31,21%; K6: 22,39%), Pematang Pudu (K4: 48,44%; K6: 40,78%), dan Tanjung Medang (K4: 58,49%; K6: 35,52%). Rendahnya capaian ini dapat dipengaruhi oleh

faktor akses, kesadaran masyarakat, maupun keterbatasan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah sudah cukup baik dalam pemeriksaan rutin kehamilan, masih ada tantangan dalam memastikan kesinambungan pemeriksaan hingga K6, terutama di daerah dengan cakupan rendah

Tabel 5. 10 Gender/Pelayanan dan lain lain, Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis Tahun 2023-2024

No	Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga	Uraian	TAHUN	
			2023	2024
1	DINKES / YANKES	Jumlah Fasilitas Kesehatan Pemerintah Dan Swasta Di Kabupaten Bengkalis	58	61
2	DINKES / YANKES	Persentase Penduduk Yang Rawat Inap Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Bengkalis	2367	2718
3	DINKES / KESMAS	Angka Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten Bengkalis	3	1
4	DINKES / KESMAS	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten BEngkalis	Pendarahan (7) Hipertensi Dalam Kehamilan (2) infeksi (1) jantung/stroke (2) gangguan metabolik DM (1) lain-lain (2)	Pendarahan (1) Hipertensi Dalam Kehamilan (1) infeksi (1) jantung/stroke (0) gangguan metabolik DM (0) lain-lain (2)
5	DINKES / KESMAS	Pelayanan Kesehata Ibu Hamil Per Kecamatan, Per Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Bengkalis	K1 (11,783) K4 (11,263)	K1 (11,296) K4 (10,670)
6	DINKES / KESMAS	Jumlah Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	10.020	9.860
7	DINKES / GIZI	Pravelensi Gizi Kabupaten Bengkalis	Gizi Buruk (1,89), Gizi Kurang (7,37), Gizi Lebih (1,87)	Gizi Buruk (0,29), Gizi Kurang (5,02), Gizi Lebih (1,73)
8	DINKES / GIZI	PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) Kabupaten Bengkalis	ASI Eksklusif (5%), Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (82,7%)	ASI Eksklusif (23,7%), Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (85,1%)
9	DINKES / P2P	Data Penderita HIV/AIDS, IMS, DBD, DIARE, TB Dan Malaria Di Kabupaten Bengkalis	HIV/AIDS (80) IMS (17) DBD (148) DIARE (78.922) TB (1.221) MALARIA (2)	HIV/AIDS (58) IMS (28) DBD (708) DIARE (28.203) TB () MALARIA (7)
10	DINKES / GIZI	Gizi Buruk Di Kabupaten Bengkalis	619	117
12	DINKES / GIZI	Angka Stunting Kabupaten Bengkalis	17,9 % (SKI 2023)	2,5 % (SSGI 2024)
11	DINKES / KESLING	Data Ketersediaan Air Minum Dan Sanitasi Di Kabupaten Bengkalis	134591	180949

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis

Berdasarkan Tabel 5.10, perkembangan indikator kesehatan di Kabupaten Bengkalis antara tahun 2023 dan 2024 menunjukkan dinamika yang beragam di berbagai aspek pelayanan kesehatan, gizi, dan lingkungan. Jumlah fasilitas kesehatan (pemerintah dan swasta) meningkat dari 58 unit pada 2023 menjadi 61 unit pada 2024, yang diikuti kenaikan jumlah penduduk yang menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dari 2.367 menjadi 2.718 orang. Angka kematian ibu melahirkan mengalami penurunan signifikan dari 3 kasus pada 2023 menjadi 1 kasus pada 2024, dengan perubahan pola penyebab kematian. Pada 2023, penyebab kematian terbanyak adalah pendarahan (7 kasus), diikuti hipertensi dalam kehamilan (2 kasus), infeksi (1 kasus), jantung/stroke (2 kasus), gangguan metabolik/DM (1 kasus), dan lain-lain (2 kasus). Sementara itu pada 2024, pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi masing-masing menyumbang 1 kasus, sedangkan jantung/stroke dan gangguan metabolik tidak ditemukan kasus, serta lain-lain tetap 2 kasus. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K1 dan K4) sedikit menurun. Pada 2023, K1 tercatat 11.783 dan K4 11.263, sedangkan pada 2024 K1 menjadi 11.296 dan K4 menurun menjadi 10.670. Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan juga sedikit berkurang.

BAB VI

DATA PERSPEKTIF GENDER BIDANG EKONOMI DAN TENAGA KERJA

1. Penduduk Dan Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan salah satu modal dasar utama dalam pembangunan. Penduduk yang berkualitas baik secara jasmani maupun rohani yang memiliki kemampuan dan keterampilan akan sangat membantu dalam pembangunan. Penduduk mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan maupun sebagai obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan penduduk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai tenaga kerja. Namun pertumbuhan penduduk usia kerja menimbulkan dampak yang sangat kompleks berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Jumlah penduduk yang dalam hal ini merupakan komposisi penduduk sangat mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk terutama penduduk usia kerja menjadi faktor utama dalam memengaruhi kondisi ketenagakerjaan yang ada. Semakin banyak penduduk angkatan kerja mengakibatkan semakin besar sumber daya manusia yang aktif dalam kegiatan ekonomi sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah, dengan catatan bahwa mereka mampu terserap dalam lapangan kerja yang ada. Namun apabila pertumbuhan ini tidak diikuti dengan tingginya penyerapan tenaga kerja oleh sektor lapangan pekerjaan yang ada maka akan menimbulkan masalah besar yang akhirnya berdampak negatif terhadap kegiatan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu, indikator ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk melihat keadaan dan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Publikasi ini membahas karakteristik penduduk usia kerja, tingkat partisipasi penduduk angkatan kerja, tingkat pengangguran, produktivitas tenaga kerja, dan kontribusi sektor lapangan pekerjaan terhadap penyerapan tenaga kerja.

2. Karakteristik Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang termasuk dalam penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berumur 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja menurut

kegiatannya dapat dibagi menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Pada tahun 2023 penduduk usia kerja Kabupaten Bengkalis sebanyak 425.312 orang dimana 61,76 persen diantaranya termasuk dalam penduduk angkatan kerja dan 38,24 persennlainnya adalah penduduk bukan angkatan kerja.

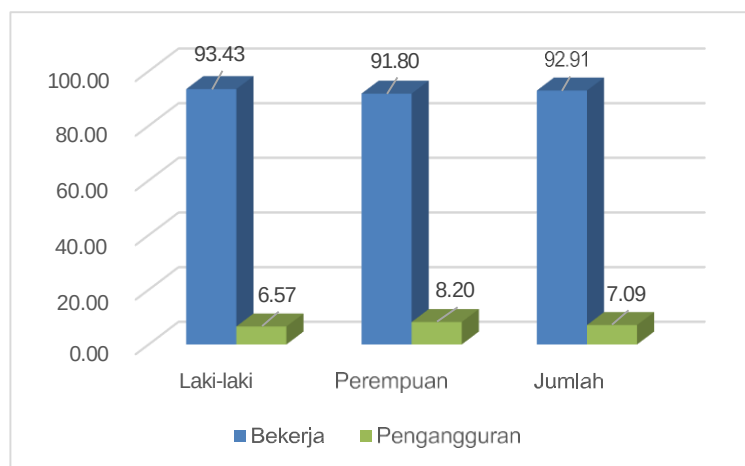
Tabel 6. 1 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	82,13	40,41	61,76
- Bekerja	76,74	37,09	57,38
- Pengangguran	5,39	3,31	4,38
Bukan Angkatan Kerja	17,87	59,59	38,24
- Sekolah	7,75	9,10	8,41
- Mengurus Rumah Tangga	3,14	49,43	25,75
- Lainnya	6,97	1,06	4,08
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

Angkatan kerja merupakan penduduk yang bekerja atau sementara tidak bekerja dan mereka yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Dari seluruh penduduk yang termasuk angkatan kerja, 92,91 persen diantaranya bekerja dan sisanya yaitu sebesar 7,09 persen merupakan penduduk yang menganggur.

Gambar 6. 1 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa dari seluruh angkatan kerja di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, persentase penduduk perempuan yang bekerja lebih kecil daripada penduduk laki-laki, yaitu 91,80 persen berbanding 93,43 persen. Gambar 2.1 juga memperlihatkan bahwa perbedaan kesempatan dalam penyerapan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 cukup kecil.

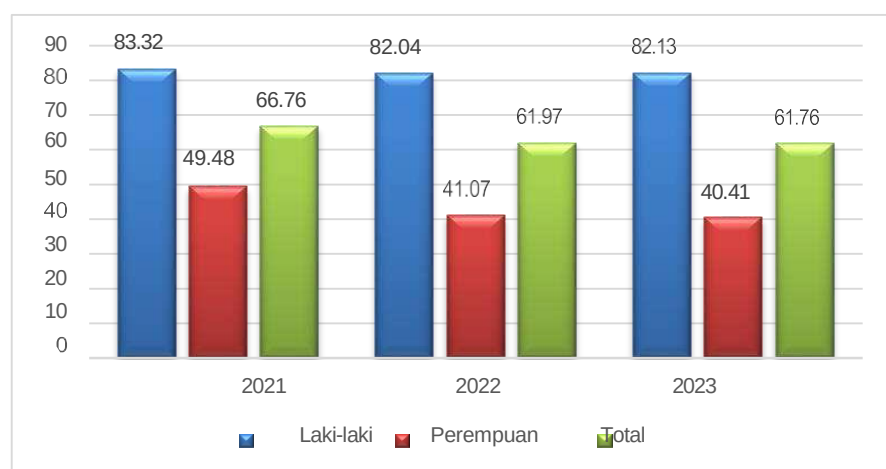
Adapun persentase penduduk laki-laki yang menganggur lebih rendah dibanding dengan persentase penduduk perempuan yang menganggur dimana persentase penduduk laki-laki yang menganggur sebesar 6,57 persen dan penduduk perempuan yang menganggur sebesar 8,20 persen.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK maka semakin baik, karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam angkatan kerja. Pada tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bengkalis sebesar 61,76 persen. Artinya, dari 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, terdapat

61 sampai 62 orang di antaranya termasuk dalam angkatan kerja atau sebanyak 61 sampai 62 orang aktif secara ekonomi.

Gambar 6. 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2023



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

Apabila tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan jauh di bawah tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ialah 40,41 persen, sedangkan untuk angkatan kerja laki-laki sebesar 82,13 persen. Jika diamati dari tahun 2021, terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung menurun, berbeda dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang cenderung stabil.

4. Pendidikan Pekerja

Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah merupakan salah satu masalah utama kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, demikian pula bagi Kabupaten Bengkalis. Banyak lapangan kerja yang membutuhkan spesifikasi pendidikan yang tinggi sedangkan keadaan angkatan kerja yang ada memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah atau tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada.

Gambar 2.3 dibawah ini memperlihatkan bahwa pada Tahun 2023, 22,32 persen penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan rendah yaitu tidak/belum tamat SD dan tamatan SD/MI/SDLB/Paket A; 62,27 persen penduduk yang bekerja memiliki tingkat pendidikan menengah yaitu tamat SMP/SMA/SMK dan persentase penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi yaitu diploma I/II/III dan tamat perguruan tinggi sebanyak 15,41 persen.

Persentase tenaga kerja perempuan yang memiliki pendidikan yang rendah lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja laki-laki yaitu sebesar 21,89 persen untuk penduduk perempuan dan 22,52 persen penduduk laki-laki. Adapun persentase tenaga kerja laki-laki yang berpendidikan menengah sebesar 65,51 persen lebih banyak apabila dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 55,39 persen. Lain halnya dengan persentase tenaga kerja perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi yang lebih banyak daripada tenaga kerja laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 22,72 persen untuk perempuan dan 11,97 persen untuk laki-laki. Terlihat bahwa beberapa pekerja perempuan dari sudut pandang pendidikan lebih baik dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Hal ini menggambarkan pekerja laki-laki di Kabupaten

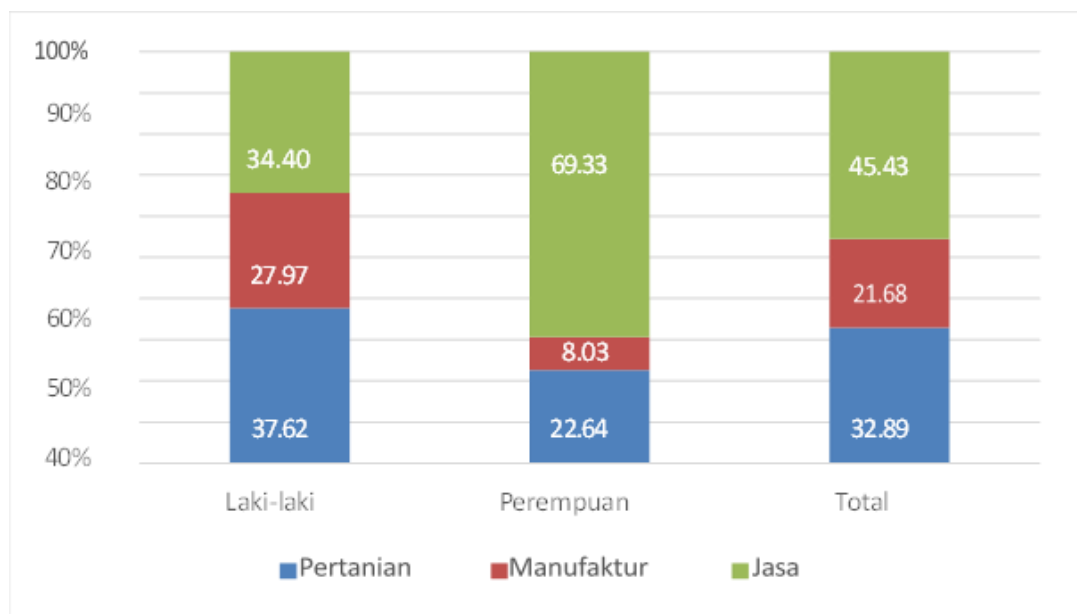
Bengkalis lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi.

Berpendidikan menengah sebesar 65,51 persen lebih banyak apabila dibandingkan dengan perempuan yaitu sebesar 55,39 persen. Lain halnya dengan persentase tenaga kerja perempuan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi yang lebih banyak daripada tenaga kerja laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 22,72 persen untuk perempuan dan 11,97 persen untuk laki-laki. Terlihat bahwa beberapa pekerja perempuan dari sudut pandang pendidikan lebih baik dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Hal ini menggambarkan pekerja laki-laki di Kabupaten Bengkalis lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi.

5. Lapangan Pekerjaan Utama

Komposisi tenaga kerja menggambarkan perbandingan jumlah tenaga kerja di suatu lapangan usaha tertentu terhadap seluruh tenaga kerja. Komposisi tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 6.3 berikut:

Gambar 6. 3 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

Gambar 6.3 memperlihatkan bahwa pada Tahun 2023 kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis diberikan oleh lapangan usaha jasa yaitu sebesar 45,43 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah pada lapangan manufaktur yaitu sebesar 21,68 persen.

6. Pengangguran

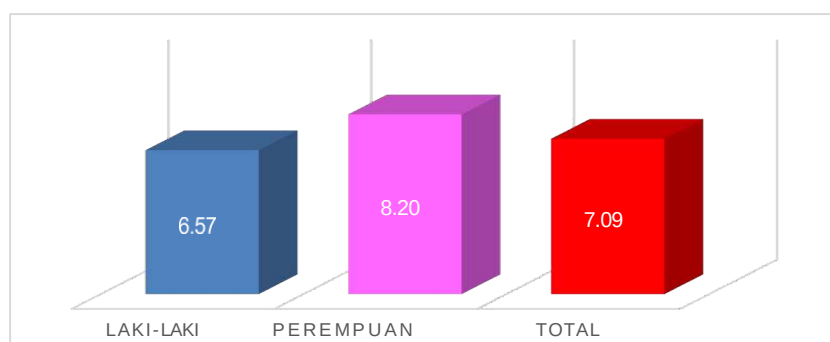
Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka dapat dikatakan kegiatan ekonomi di suatu daerah semakin maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya.

Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan mengenai pengangguran dapat menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terdidik, dan tingkat pengangguran terselubung atau setengah pengangguran.

a. Pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan Gambar 2.7, pada Agustus Tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkalis sebesar 7,09 persen. Artinya dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat 7 sampai 8 orang yang menganggur.

Gambar 6. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023



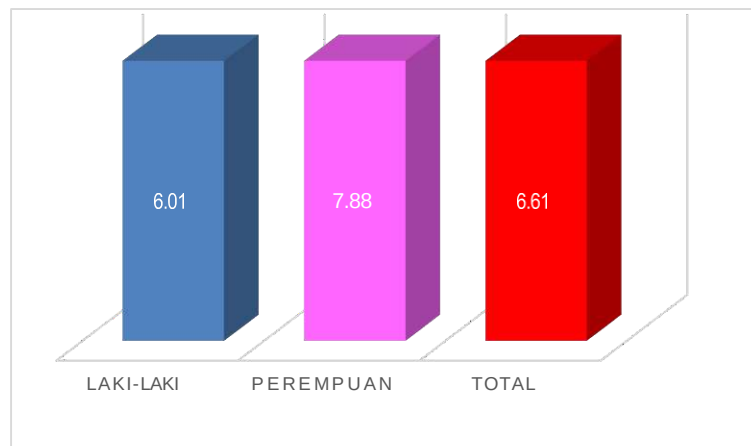
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

Pada Tahun 2023, persentase angkatan kerja laki-laki yang menganggur sebesar 6,57 persen, sedangkan persentase angkatan kerja perempuan yang menganggur sebesar 8,20 persen.

b. Pengangguran terdidik

Tingkat pengangguran terdidik adalah rasio jumlah pengangguran yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) atau lebih yang dianggap sebagai kelompok penduduk terdidik terhadap jumlah angkatan kerja.

Gambar 6. 5 Tingkat Pengangguran Terdidik Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

Gambar 6.5 memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terdidik di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 sebesar 6,61 persen. Artinya dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat sekitar 6 sampai 7 orang pengangguran terdidik. Pada Tahun 2023, persentase pengangguran terdidik laki-laki sebesar 6,01 persen, sedangkan persentase pengangguran terdidik perempuan sebesar 7,88 persen.

c. Pekerja Tidak Penuh

Pekerja tidak penuh merupakan mereka yang bekerja tetapi jam kerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam selama seminggu. Persentase pekerja tidak penuh secara kasar dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat seberapa besar produktivitas pekerja.

Tabel 6. 2 Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Jenis Kelamin

Jumlah Jam	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0*	2,30	1,70	2,11
1-14	5,79	12,65	7,96
15-34	19,95	30,55	23,30
35+	71,96	55,10	66,64
Jumlah	100,00	100,00	100,00

*) Sementara tidak bekerja

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2023

Tabel 6.2 memperlihatkan persentase jumlah pekerja yang termasuk dalam kategori pekerja tidak penuh, tampak bahwa sebanyak 33,36 persen merupakan pekerja tidak penuh. Dengan pengertian lain sebesar 33,36 persen dari total pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam selama seminggu. Sedangkan untuk tenaga kerja yang bekerja dengan jam kerja normal atau 35 jam atau lebih sebesar 66,64 persen.

Apabila dibandingkan menurut jenis kelamin, dengan melihat persentase pekerja menurut jumlah jam kerja maka terlihat pekerja laki-laki masih lebih produktif dibandingkan pekerja perempuan. Hal ini terlihat di kalangan perempuan 44,90 persen bekerja dibawah jam kerja normal (35 jam keatas hanya 55,10 persen) sedangkan untuk pekerja laki-laki hanya sebanyak 28,04 persen. Keadaan ini dapat menggambarkan bahwa pekerja perempuan lebih banyak yang bekerja (baik sukarela maupun terpaksa) dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu.

BAB VII

SOSIAL DAN HUKUM

1. Hukum dan Keamanan

Tabel 7. 1 Jumlah Produk Hukum Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 s.d. 2021, dan 2023

No	Produk Hukum	2019	2020	2021	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peraturan Daerah	14	3	7	8
2	Peraturan Bupati	77	96	174	57
3	Keputusan Bupati	483	573	731	803

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Tabel 7.1, jumlah produk hukum di Kabupaten Bengkalis selama periode 2019, 2020, 2021, dan 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan pada setiap jenisnya. Untuk Peraturan Daerah, jumlahnya relatif kecil dibandingkan produk hukum lainnya, dengan kecenderungan berfluktuasi—sebanyak 14 peraturan pada 2019, menurun drastis menjadi 3 peraturan pada 2020, kemudian meningkat menjadi 7 pada 2021, dan kembali naik menjadi 8 pada 2023.

Peraturan Bupati mengalami peningkatan tajam dari 77 pada 2019 menjadi 96 pada 2020, lalu melonjak hampir dua kali lipat menjadi 174 pada 2021. Namun, pada 2023 jumlahnya turun drastis menjadi hanya 57, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan kebijakan atau efisiensi regulasi.

Sementara itu, Keputusan Bupati menjadi produk hukum dengan jumlah terbanyak setiap tahunnya. Trennya menunjukkan peningkatan konsisten dari 483 pada 2019 menjadi 573 pada 2020, lalu naik signifikan menjadi 731 pada 2021, dan mencapai puncak tertinggi 803 pada 2023. Lonjakan ini dapat mengindikasikan tingginya intensitas pengambilan keputusan administratif dan teknis oleh pemerintah daerah pada periode tersebut.

Tabel 7. 2 Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun	Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD
(1)	(2)
2019	2
2020	
2021	2
2022	1
2023	6

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Tabel 7.2, jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD Kabupaten Bengkalis pada periode 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, DPRD menghasilkan 2 Peraturan Daerah inisiatif. Tahun 2020 tidak tercatat adanya produk peraturan daerah inisiatif, yang dapat mengindikasikan terhentinya proses legislasi inisiatif DPRD pada tahun tersebut, kemungkinan akibat faktor seperti pandemi COVID-19 atau prioritas kebijakan lain. Pada tahun 2021, jumlahnya kembali meningkat menjadi 2, menunjukkan adanya upaya pengaktifan kembali fungsi legislasi DPRD. Namun, di tahun 2022 angka ini menurun menjadi 1, yang mengindikasikan penurunan aktivitas legislasi inisiatif. Lonjakan signifikan terjadi pada 2023, di mana DPRD menghasilkan 6 Peraturan Daerah inisiatif, menjadi jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa meskipun jumlah Perda inisiatif DPRD tidak selalu stabil dari tahun ke tahun, terdapat peningkatan yang cukup mencolok pada 2023 yang bisa menjadi indikasi penguatan peran legislatif dalam menghasilkan kebijakan daerah.

Tabel 7. 3 Data DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2023

No	Elemen Data	Satuan	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Integrasi dan sinkronisasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen perencanaan (Pemda/PD) (Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan)	Status	Ada	Ada
2	Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran Setwan	Status	Ada	Ada

3	Tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran	Status	Ada	Ada
4	Tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan	Persen	100	100
5	Jumlah Inventarisasi dan Evaluasi Program legislasi Daerah (Prolegda) yang di Inisiasi oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis	Prolegda	17	Ada

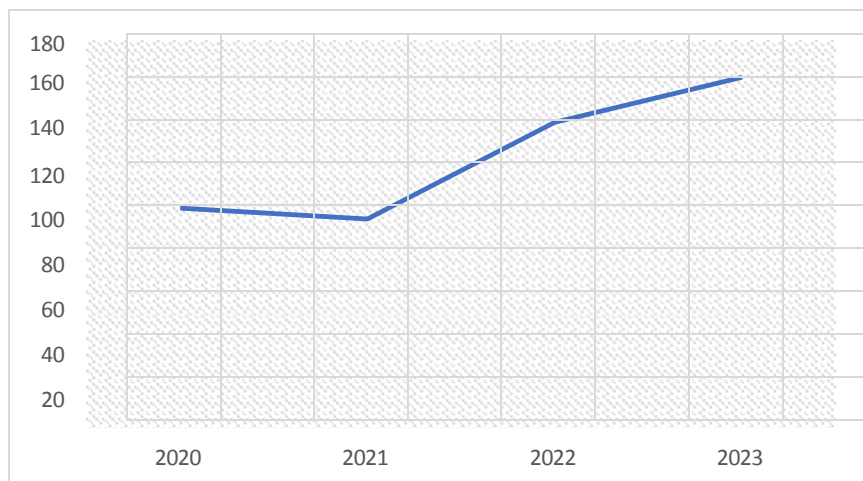
Berdasarkan Tabel 7.3, data DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan fungsi dan perencanaan kelembagaan.

Integrasi dan sinkronisasi program kerja DPRD yang mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan ke dalam dokumen perencanaan, khususnya *Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan*, tercatat status “Ada” pada kedua tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa DPRD secara berkesinambungan melakukan penyelarasan program kerja dengan rencana pembangunan daerah. Selain itu, tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD (Setwan) juga memiliki status “Ada” baik di 2022 maupun 2023, yang menandakan adanya konsistensi antara dokumen perencanaan dan alokasi anggaran. Pada aspek kesesuaian target dan realisasi anggaran, status “Ada” di kedua tahun tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja DPRD sejalan dengan perencanaan keuangan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2023, DPRD Kabupaten Bengkalis berhasil mempertahankan kesinambungan perencanaan, penganggaran, serta pencapaian target kinerja secara selaras dengan fungsi dan tugasnya. Berdasarkan tambahan data pada Tabel 5.2.3, terlihat bahwa tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pelayanan sekretariat DPRD dinilai sangat memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan lembaga legislatif dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Sementara itu, jumlah inventarisasi dan evaluasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah tercatat sebanyak 17 Prolegda pada tahun 2022. Pada tahun 2023, meskipun tidak disebutkan jumlah pastinya, statusnya “Ada”, yang mengindikasikan bahwa kegiatan inventarisasi dan evaluasi Prolegda tetap berjalan di tahun tersebut.

Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa dari 2022 hingga 2023, DPRD Kabupaten Bengkalis tidak hanya mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja pelayanan Setwan, tetapi juga terus melaksanakan proses legislasi daerah yang melibatkan perangkat daerah.

Gambar 7. 1 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2023



Gambar ini memperlihatkan tren jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkalis selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah kasus berada di kisaran 110 kasus. Pada tahun 2021 terjadi sedikit penurunan menjadi sekitar 105 kasus. Namun, sejak tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan, mencapai lebih dari 130 kasus, dan terus meningkat hingga tahun 2023 dengan jumlah sekitar 160 kasus. Dari data ini terlihat bahwa meskipun terjadi penurunan awal pada tahun 2021, secara keseluruhan tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir, menandakan perlunya perhatian lebih terhadap upaya pencegahan dan perlindungan korban kekerasan.

Tabel 7. 4 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2023

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bengkalis	28	25	41	39
2	Bantan	7	8	12	16
3	Bukit Batu	1	0	4	3
4	Mandau	34	38	44	38
5	Rupat	0	4	1	19

Berdasarkan Tabel 7.5, jumlah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkalis selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan pola yang beragam di tiap kecamatan. Kecamatan Bengkalis mengalami fluktuasi, dengan jumlah kasus meningkat pada tahun 2022 menjadi 41 kasus dan sedikit menurun pada 2023 menjadi 39 kasus, namun tetap lebih tinggi dibandingkan 2020 dan 2021. Kecamatan Bantan menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 7 kasus pada 2020 menjadi 16 kasus pada 2023, menandakan adanya kenaikan pelaporan kasus di wilayah ini. Kecamatan Bukit Batu relatif rendah dalam jumlah kasus, mulai dari 1 kasus pada 2020, nihil pada 2021, meningkat menjadi 4 pada 2022, dan sedikit menurun menjadi 3 kasus pada 2023. Kecamatan Mandau menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi secara keseluruhan, meningkat dari 34 kasus pada 2020 menjadi 44 kasus pada 2022, dan kemudian sedikit menurun menjadi 38 kasus pada 2023. Sementara itu, Kecamatan Rupat menunjukkan lonjakan signifikan pada 2023, dari 0 kasus pada 2020 menjadi 19 kasus. Secara keseluruhan, sebagian besar kecamatan mengalami peningkatan jumlah kasus pada 2022 dan 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan Mandau dan Bengkalis sebagai wilayah dengan kasus tertinggi, sementara Rupat menunjukkan kenaikan yang cukup drastis pada tahun terakhir.

Tabel 7. 5 Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak tiap Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2023

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rupat Utara	0	0	0	2
2	Siak Kecil	4	1	7	2
3	Pinggir	20	11	13	15
4	Bandar Laksamana	2	2	4	0
5	Talang Muandau	1	2	5	3
6	Bathin Solapan	5	6	11	26
Jumlah		102	97	142	163

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan data tambahan dari Tabel 7.5, kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan lainnya di Kabupaten Bengkalis juga menunjukkan variasi. Kecamatan Rupat Utara relatif rendah, dengan nihil kasus pada 2020 hingga 2022 dan muncul 2 kasus pada 2023. Kecamatan Siak Kecil mengalami fluktuasi, dari 4 kasus pada 2020 menurun menjadi 1 kasus pada 2021, naik menjadi 7 kasus pada 2022, dan kembali turun menjadi 2 kasus pada 2023. Kecamatan Pinggir menunjukkan tren menurun pada 2021 (11 kasus) setelah 20 kasus pada 2020, lalu meningkat secara bertahap menjadi 13 kasus pada 2022 dan 15 kasus pada 2023. Kecamatan Bandar Laksamana mengalami kenaikan dari 2 kasus pada 2020 dan 2021 menjadi 4 kasus pada 2022, namun kembali nihil pada 2023. Kecamatan Talang Muandau menunjukkan peningkatan dari 1 kasus pada 2020 menjadi 5 kasus pada 2022, dan sedikit menurun menjadi 3 kasus pada 2023. Sementara itu, Kecamatan Bathin Solapan mengalami lonjakan signifikan, dari 5 kasus pada 2020 menjadi 26 kasus pada 2023. Secara keseluruhan, total kasus di seluruh kecamatan meningkat dari 102 kasus pada 2020 menjadi 163 kasus pada 2023, menunjukkan tren kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu tersebut.

Tabel 7. 6 Jumlah Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Layanan di Kabupaten Bengkalis
Tahun 2022 – 2023

No	Elemen Data	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	5	2
2	Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	3	5
3	Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	19	38

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Tabel 7.6, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan di Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan antara tahun 2022 dan 2023. Layanan rehabilitasi sosial menurun dari 5 kasus pada 2022 menjadi 2 kasus pada 2023. Sebaliknya, layanan bantuan hukum mengalami peningkatan, dari 3 kasus pada 2022 menjadi 5 kasus pada 2023. Peningkatan paling signifikan terlihat pada layanan kesehatan, yang naik dari 19 kasus pada 2022 menjadi 38 kasus pada 2023, menunjukkan adanya peningkatan akses atau pemanfaatan layanan kesehatan bagi korban kekerasan. Data ini mencerminkan dinamika dalam pemenuhan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bengkalis, dengan fokus yang semakin meningkat pada aspek kesehatan.

Tabel 7. 7 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2023

No	Kecamatan	2022		
		Rumah Tangga / KK	Korban KDRT	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bengkalis	26.768	5	0,00019
2	Bantan	14.160	-	-
3	Bukit Batu	6.636	-	-
4	Mandau	45.868	4	0,00009

Berdasarkan Tabel 7.7, jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang menerima layanan di Kabupaten Bengkalis menunjukkan perubahan antara tahun 2022 dan 2023. Layanan rehabilitasi sosial mengalami penurunan, dari 5 kasus pada 2022 menjadi 2 kasus pada 2023, sementara layanan bantuan hukum meningkat dari 3 kasus menjadi 5 kasus. Peningkatan paling signifikan terlihat pada layanan

kesehatan, yang naik dari 19 kasus pada 2022 menjadi 38 kasus pada 2023, menunjukkan peningkatan akses atau pemanfaatan layanan kesehatan bagi korban. Hal ini mencerminkan dinamika pemenuhan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak, dengan perhatian yang semakin besar pada aspek kesehatan.

Tabel 7. 8 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	2022		
		Rumah Tangga / KK	Korban KDRT	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rupat	11.396	1	0,00009
2	Rupat Utara	4.592	-	-
3	Siak Kecil	8.190	-	-
4	Pinggir	21.380	1	0,00005
5	Bandar Laksamana	5.083	-	-
6	Talang Muandau	8.834	-	-
7	Bathin Solapan	29.480	1	0,00003
Kabupaten Bengkalis		109.177	12	0,00011

Berdasarkan data tahun 2022 mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkalis, terlihat bahwa sebagian besar kecamatan melaporkan kasus yang sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Kecamatan Rupat memiliki 11.396 rumah tangga dengan 1 kasus KDRT, menghasilkan rasio 0,00009. Rupat Utara, Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Talang Muandau tidak melaporkan adanya kasus, sehingga rasio tidak tersedia. Kecamatan Pinggir mencatat 1 kasus dari 21.380 rumah tangga dengan rasio 0,00005, sedangkan Bathin Solapan memiliki 1 kasus dari 29.480 rumah tangga dengan rasio 0,00003. Secara keseluruhan, Kabupaten Bengkalis mencatat 12 kasus KDRT dari total 109.177 rumah tangga, dengan rasio 0,00011, menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus terdeteksi relatif kecil dibanding jumlah rumah tangga, kasus KDRT tetap terjadi di beberapa wilayah dan perlu menjadi perhatian dalam upaya pencegahan dan perlindungan keluarga.

Lanjutan Tabel 7.8

No	Kecamatan	2023		
		Rumah Tangga / KK	Korban KDRT	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bengkalis	27.301	4	0,00014
2	Bantan	14.496	-	-
3	Bukit Batu	6.875	-	-
4	Mandau	47.029	6	0,00012
5	Rupat	11.787	2	0,00016
6	Rupat Utara	4.801	-	-
7	Siak Kecil	8.476	-	-
8	Pinggir	22.256	1	0,000044
9	Bandar Laksamana	5.359	-	-
10	Talang Muandau	9.291	-	-
11	Bathin Solapan	31.412	-	-
Kabupaten Bengkalis		189.083	13	0,00046

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan data tahun 2023 yang merupakan lanjutan dari Tabel 7.8, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bengkalis mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Kecamatan Bengkalis mencatat 4 kasus dari 27.301 rumah tangga, menghasilkan rasio 0,00014. Kecamatan Mandau memiliki jumlah kasus tertinggi dengan 6 kasus dari 47.029 rumah tangga, rasio 0,00012. Kecamatan Rupat juga mengalami peningkatan dengan 2 kasus dari 11.787 rumah tangga, rasio 0,00016. Kecamatan Pinggir melaporkan 1 kasus dari 22.256 rumah tangga dengan rasio 0,000044. Sementara itu, Kecamatan Bantan, Bukit Batu, Rupat Utara, Siak Kecil, Bandar Laksamana, Talang Muandau, dan Bathin Solapan tidak melaporkan kasus KDRT pada tahun ini. Secara keseluruhan, Kabupaten Bengkalis mencatat 13 kasus KDRT dari total 189.083 rumah tangga, dengan rasio 0,00046. Data ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara relatif kasus KDRT tetap rendah dibandingkan jumlah rumah tangga, menandakan perlunya perhatian berkelanjutan dalam pencegahan dan perlindungan keluarga di berbagai kecamatan.

2. Satuan Pamong Praja Bengkalis

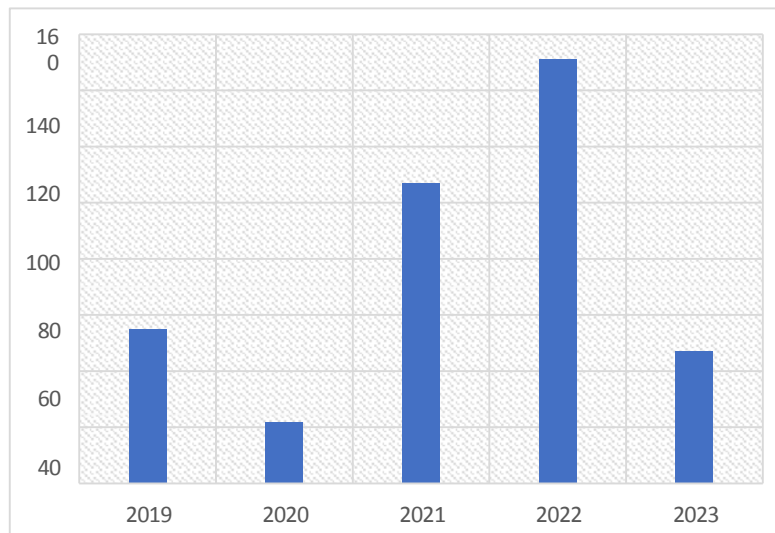
Tabel 7. 9 Jumlah Satuan Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja		
	ASN	Non ASN / Banpol	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	87	279	366
2020	85	279	364
2021	85	296	381
2022			430
2023	82	346	428

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Tabel 7.9, jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang bervariasi. Pada tahun 2019, total personel mencapai 366 orang, terdiri dari 87 ASN dan 279 Non ASN atau anggota Banpol. Jumlah ini sedikit menurun pada 2020 menjadi 364 personel dengan 85 ASN dan 279 Non ASN. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan menjadi 381 personel, dengan 85 ASN dan 296 Non ASN. Data tahun 2022 mencatat total personel sebanyak 430, meskipun rincian ASN dan Non ASN tidak tersedia. Pada tahun 2023, jumlah personel sedikit menurun menjadi 428 orang, terdiri dari 82 ASN dan 346 Non ASN. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Bengkalis dari 2019 hingga 2023, terutama di bagian Non ASN/ Banpol, yang menjadi komponen terbesar dari total personel.

Gambar 7. 2 Jumlah Kasus yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 s.d. 2023



Berdasarkan Gambar 7.2, jumlah kasus yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, jumlah kasus berada di angka sekitar 80 kasus. Tahun 2020 terjadi penurunan tajam menjadi sekitar 50 kasus. Selanjutnya, jumlah kasus meningkat secara signifikan pada 2021 mencapai lebih dari 100 kasus, dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan sekitar 150 kasus. Pada 2023, jumlah kasus menurun kembali menjadi sekitar 75 kasus, kembali ke level yang mirip dengan tahun 2019. Data ini menunjukkan bahwa penanganan kasus oleh Satpol PP mengalami perubahan yang cukup drastis setiap tahunnya, dengan puncak penanganan terjadi pada tahun 2022.

BAB VIII

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

1. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, termasuk pada tingkat daerah seperti Kabupaten Bengkalis. Partisipasi aktif perempuan di sektor publik bukan hanya mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara, tetapi juga menjadi indikator kemajuan demokrasi, kesetaraan gender, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Keterlibatan perempuan di berbagai lini publik dapat memperluas perspektif kebijakan, memperkaya pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterwakilan perempuan di sektor publik sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya Tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Oleh karena itu, kajian mengenai posisi dan peran perempuan dalam ranah publik di Kabupaten Bengkalis menjadi penting, baik untuk memetakan capaian maupun merumuskan strategi peningkatan partisipasi di masa mendatang.

Representasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas demokrasi dan keberhasilan prinsip kesetaraan gender di suatu wilayah (Phillips, 1995; Krook, 2009). Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya berfungsi sebagai simbol keadilan representatif (*descriptive representation*), tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Namun, di Kabupaten Bengkalis, proporsi keterwakilan perempuan di DPRD periode 2023/2024 masih berada jauh di bawah standar ideal yang dianjurkan oleh *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) maupun target 30% keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu di Indonesia. Dari

total 45 anggota DPRD, hanya 7 orang atau sekitar 15,5% yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan sisanya 38 orang (84,5%) adalah laki-laki.

Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan struktural, kultural, dan institusional yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam politik formal. Untuk memahami fenomena tersebut, perlu dianalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya representasi perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan kerangka teori politik gender, termasuk perspektif patriarki, *gatekeeping politics*, *agenda-setting media*, dan *social movement theory*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya representasi Perempuan di DPRD Kabupaten Bengkalis, biasanya diliputi oleh **Pertama, Hegemoni Budaya Patriarki**, Berdasarkan perspektif gender and politics (Sapiro, 1981; Walby, 1990), rendahnya representasi perempuan di ranah politik kerap dikaitkan dengan dominasi budaya patriarki yang telah mengakar. Di Kabupaten Bengkalis, konstruksi sosial yang menempatkan politik sebagai arena dominasi laki-laki masih sangat kuat. Hal ini selaras dengan konsep public-private dichotomy yang membagi peran laki-laki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik. Pandangan ini tidak hanya membatasi akses perempuan pada ruang politik, tetapi juga menciptakan stereotip bahwa perempuan tidak layak atau tidak kompeten menduduki jabatan legislatif.

Kedua, Seleksi Kandidat yang cenderung maskulin dan elitis. Dalam teori gatekeeping politics (Norris & Lovenduski, 1995), proses rekrutmen politik sering kali ditentukan oleh elite partai yang memiliki preferensi subjektif dan bias gender. Di Bengkalis, mekanisme seleksi calon legislatif dilakukan oleh struktur pimpinan partai yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Ketimpangan ini memunculkan institutional gender bias yang berdampak pada rendahnya peluang perempuan untuk diusung sebagai kandidat dengan nomor urut strategis (winnable position). Minimnya sensitifitas gender dalam pengambilan keputusan partai memperkuat eksklusi perempuan dari proses politik formal.

Ketiga, Peran Media yang belum progresif terhadap isu representasi gender. Media, sebagaimana dijelaskan dalam teori agenda-setting (McCombs & Shaw, 1972), memiliki peran vital dalam membentuk persepsi publik terhadap pentingnya keterwakilan perempuan. Namun, di tingkat lokal seperti Bengkalis, media belum optimal dalam mengarusutamakan narasi kesetaraan gender

dalam politik. Representasi perempuan dalam pemberitaan masih minim, sehingga kesadaran publik terkait urgensi partisipasi politik perempuan belum terbentuk secara sistematis. dan **keempat, minimnya jaringan pendukung dan alinsi politik gender**. Dalam kajian social movement theory (Tarrow, 1998), keberhasilan representasi kelompok marjinal sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan dan aliansi strategis. Di Bengkalis, keterhubungan antara organisasi perempuan, LSM, dan partai politik masih lemah. Ketidadaan koalisi ini mengakibatkan advokasi kuota perempuan tidak memiliki daya tekan yang cukup dalam sistem politik lokal. Padahal, kolaborasi lintas aktor ini berpotensi menjadi katalis untuk mendorong perubahan kebijakan afirmatif.

Faktor lain yang memperburuk kondisi tersebut, biasanya diliputi oleh **Pertama, Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan**. dalam perspektif *intersectionality*, hambatan ganda terjadi ketika perempuan berada pada posisi rentan secara ekonomi dan pendidikan. Di Bengkalis, kesenjangan ini membatasi jumlah perempuan yang memiliki kapasitas politik untuk bersaing dengan laki-laki. Perempuan dengan kapabilitas tinggi sering memilih berkiprah di ranah non-partisan, seperti LSM atau dunia pendidikan, dibanding terjun ke politik praktis. **Kedua, Faktor Keluarga dan Beban Peran Ganda**, Konsep *gender role socialization* menjelaskan bahwa norma sosial masih membebankan peran domestik secara dominan kepada perempuan. Bagi perempuan di Bengkalis yang sudah berkeluarga, keterlibatan politik seringkali terhambat oleh resistensi pasangan, kewajiban rumah tangga, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Partisipasi politik yang memerlukan intensitas waktu dan biaya tinggi menjadi tantangan besar, kecuali bagi mereka yang berhasil menduduki posisi yang dianggap *financially rewarding*, seperti kursi legislatif.

Tabel 8. 1Jumlah fraksi/partai politik yang mendapatkan kursi pada DPRD Kabupaten Bengkalis periode ini adalah 7 fraksi, yaitu:

No	Fraksi/ Partai Politik	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Perempuan	Nama Anggota Perempuan
1	2	3	4	5
1	PDI Perjuangan	9	2	1. Febriza Luwu 2. Mila Fitria
2	NasDem	5	1	1. Rosmawati Sinambel, A.Md.Keb

3	Gerindra	5	0	-
4	PKS	5	2	1. Hj. Nurhasanah, Lc 2. Hj. Zahraini.B, S.Pd, MP
5	PKB	4	1	1. Sri Mazoli
6	Bintang Demokrat Karya	8	1	1. Hj. Anita SH
7	Amanat Perindo Persatuan	9	0	-

Sumber: Sekretariat Dewan Kab. Bengkalis Tahun 2025

2. Peran dan Komposisi Perempuan di Lembaga Yudikatif

Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif Kabupaten Bengkalis mencerminkan sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah diimplementasikan dalam sistem birokrasi dan pengambilan kebijakan publik. Berdasarkan data terpilah tahun 2023–2024, terlihat bahwa meskipun perempuan telah hadir dalam berbagai posisi strategis, proporsinya masih relatif rendah dibanding laki-laki, khususnya pada jabatan manajerial di instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum.

A. Representasi Perempuan di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Data Kejari Bengkalis memperlihatkan keberadaan beberapa perempuan pada jabatan manajerial, seperti Kepala Kejaksaan Negeri (Nadda Lubis, S.H., M.H.) dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Sri Madona Rasdy, S.H., M.H.). Meski demikian, mayoritas posisi manajerial masih diisi laki-laki, dan pada jabatan non-manajerial, perempuan juga berada dalam posisi minoritas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis ada, penetrasi mereka masih terbatas.

Tabel 8. 2 Data Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif

(Kejaksaan Negeri Bengkalis)			
Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Persentase Perempuan
Manejerial	7	2	22,2 %
Non-Manajerial	8	2	20 %

Kehadiran perempuan di posisi strategis, seperti Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Seksi Perdata & Tata Usaha Negara, menunjukkan bahwa perempuan mampu memimpin di sektor hukum. Namun, secara keseluruhan, keterwakilan perempuan baik di jabatan manajerial maupun non-manajerial masih berada di bawah 25%. Angka ini menandakan adanya kesenjangan peluang karier yang signifikan, di mana akses perempuan untuk berkembang

dan menempati posisi kunci masih terbatas. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi upaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang hukum.

B. Representasi Perempuan di Pengadilan Negeri Bengkalis

Di Pengadilan Negeri Bengkalis, data jabatan manajerial dan non-manajerial juga menunjukkan keterwakilan perempuan yang belum setara. Walaupun perempuan hadir dalam jajaran hakim dan staf struktural, jumlahnya masih kalah dibandingkan laki-laki, khususnya di jabatan pimpinan. Fenomena ini mencerminkan pola umum di sektor peradilan, di mana jenjang karier dan proses promosi masih kerap dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural.

Tabel 8. 3 Data Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif (Pengadilan Negeri Bengkalis)

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Persentase Perempuan
Manejerial	5	1	16,7%
Non-Manajerial	10	4	28,6%

Rendahnya persentase perempuan di jabatan manajerial, yang hanya mencapai 16,7%, mencerminkan masih terbatasnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan strategis. Meskipun distribusi di posisi non-manajerial terlihat sedikit lebih baik, pola ini menguatkan gambaran bahwa perempuan cenderung lebih banyak mengisi jabatan fungsional atau staf dibanding memimpin unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam jenjang kepemimpinan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

3. Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Eksekutif)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan institusi eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik. Struktur kepemimpinan eksekutif dipimpin oleh **Bupati Kasmarni**, perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati di Provinsi Riau, bersama Wakil Bupati **Bagus Santoso**. Kasmarni dilantik kembali pada **20 Februari 2025** di Istana Negara oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kehadiran Kasmarni sebagai Bupati sekaligus menegaskan kiprah perempuan dalam politik lokal dan birokrasi di Kabupaten Bengkalis.

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengusung visi dan misi pembangunan periode **2025–2030** yang telah dipaparkan pada **Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, 10 Maret 2025**. Visi ini kemudian dijalankan melalui perangkat daerah yang dipimpin oleh sejumlah kepala dinas dengan beragam program strategis, termasuk tokoh-tokoh perempuan yang berperan penting dalam mendukung agenda eksekutif.

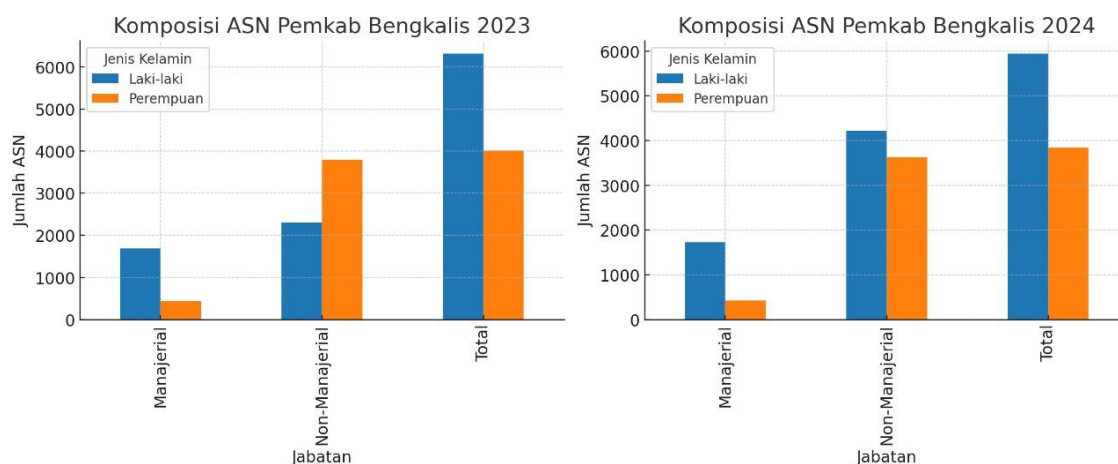
Beberapa figur perempuan yang menduduki jabatan kepala dinas antara lain:

- **Emilda Susanti, S.STP., M.IP**, menjabat sebagai **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)**. Ia aktif mendorong sinergi program untuk peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat peran organisasi perempuan di Kabupaten Bengkalis.
- **Susy Hartati, SP., M.Si**, menjabat sebagai **Kepala Dinas Ketahanan Pangan**, yang bertugas memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan daerah.
- **Paulina, S.Pi., M.Si**, menjabat sebagai **Kepala Dinas Sosial**, dengan fokus pada peningkatan layanan kesejahteraan sosial dan penanganan permasalahan sosial masyarakat.

Kehadiran pimpinan perempuan di jajaran eksekutif ini bukan hanya melengkapi struktur birokrasi, tetapi juga memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, keberadaan **Kasmarni** sebagai Bupati dan sejumlah **kepala dinas perempuan** menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Kabupaten Bengkalis telah memberikan ruang signifikan bagi perempuan untuk memimpin dan mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah.

Di satu sisi, kepemimpinan perempuan di tingkat eksekutif Kabupaten Bengkalis patut diapresiasi. Namun, di sisi lain, gambaran lebih luas tentang keterwakilan gender dalam birokrasi justru memperlihatkan adanya tantangan. Data dari BKPP mengonfirmasi bahwa proporsi perempuan di posisi strategis masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Data dari BKPP menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah total ASN (PNS + PPPK) mencapai 8.853 orang, dengan 4.011 perempuan (45,3%) dan 4.842 laki-laki (54,7%). Namun, pada level manajerial, perempuan hanya menduduki 439 posisi (sekitar 21% dari total jabatan manajerial PNS), sementara laki-laki menempati 1.687 posisi. Pada tahun 2024,

terjadi sedikit peningkatan proporsi, tetapi gap gender di posisi strategis tetap signifikan, menandakan tantangan dalam mengangkat perempuan ke peran pengambil keputusan.

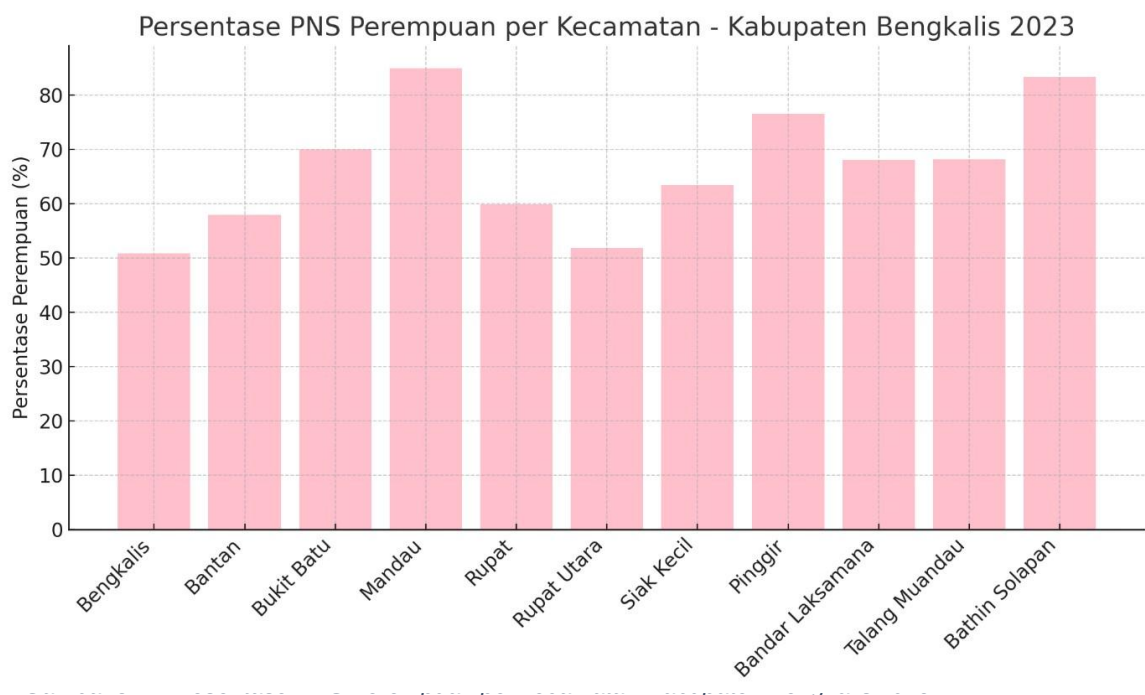


Gambar 8. 1 Diagram Komposisi ASN Pemkab Bengkalis 2023-2024

terbaru menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi jabatan. Proporsi perempuan di posisi manajerial justru mengalami penurunan dari 20,7% pada 2023 menjadi 19,6% pada 2024. Sebaliknya, di posisi non-manajerial, keterwakilan perempuan relatif tinggi, menandakan bahwa mereka lebih banyak mengisi peran pelaksana daripada pengambil keputusan strategis. Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan struktural yang membatasi peluang promosi bagi perempuan, sehingga kesetaraan gender di tingkat kepemimpinan belum sepenuhnya tercapai.

Tabel 8. 4 Data Jumlah PNS Per Kecamatan dan Jenis Kelamin di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

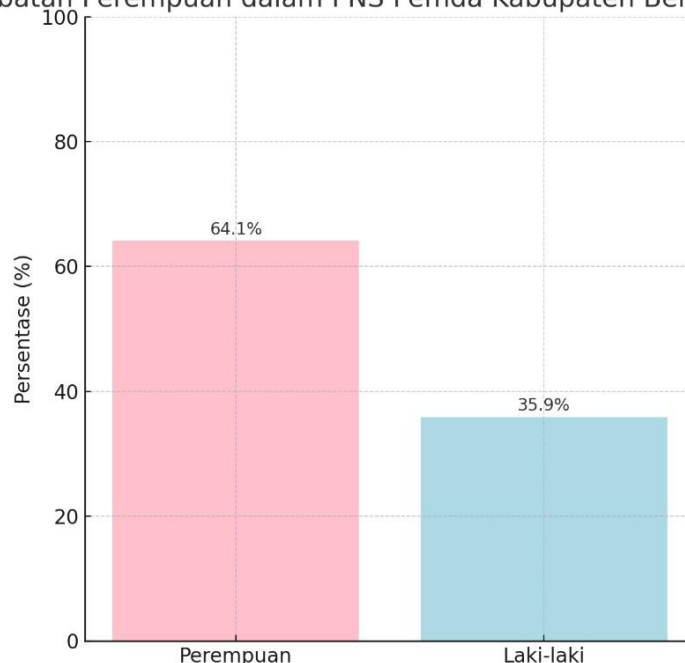
No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bengkalis	1.313	1.359	2.672
2	Bantan	170	234	404
3	Bukit Batu	79	184	263
4	Mandau	148	835	983
5	Rupat	156	233	389
6	Rupat Utara	67	72	139
7	Siak Kecil	106	184	290
8	Pinggir	89	291	380
9	Bandar Laksamana	45	96	141
10	Talang Muandau	50	107	157
11	Bathin Solapan	83	416	499
Total		2.306	4.011	6.317



Berdasarkan data, jumlah PNS di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 mencapai 6.317 orang, dengan distribusi 63,5% perempuan (4.011 orang) dan 36,5% laki-laki (2.306 orang). Secara agregat, ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jumlah PNS secara keseluruhan. Kecamatan dengan proporsi perempuan tertinggi adalah Mandau (84,9%), diikuti oleh Bathin Solapan (83,4%) dan Pinggir (76,6%). Kecamatan dengan proporsi perempuan terendah adalah Rupert Utara (51,8%), mendekati kesetaraan gender secara numerik. Hanya sedikit kecamatan yang memiliki distribusi relatif seimbang (50–60% perempuan), menandakan adanya konsentrasi tenaga kerja perempuan di wilayah tertentu.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif segregasi horizontal dalam pasar kerja sektor publik. Tingginya proporsi perempuan di banyak kecamatan mungkin dipengaruhi oleh: **Pertama**, Persepsi sosial dan budaya yang mendorong perempuan untuk memilih pekerjaan di sektor publik karena dianggap stabil, aman, dan sesuai dengan peran domestik. **Kedua**, Jenis jabatan dan fungsi kerja yang tersedia di kecamatan tertentu, di mana posisi administratif dan pelayanan publik lebih banyak diisi perempuan. Dan **ketiga** Kebijakan rekrutmen daerah yang tidak secara eksplisit bias gender, namun praktik promosi dan distribusi tenaga kerja bisa tetap mempengaruhi representasi.

Keterlibatan Perempuan dalam PNS Pemda Kabupaten Bengkalis (2024)



Gambar 8. 3 Diagram Keterlibatan Perempuan dalam PNS Kab. Bengkalis

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mencapai **5.990 orang**, dengan keterlibatan perempuan sebesar **64,1%** (3.841 orang) dan laki-laki **35,9%** (2.149 orang). Tingginya proporsi perempuan ini menunjukkan bahwa mereka memegang peran dominan secara kuantitatif dalam birokrasi daerah. Namun, dominasi jumlah belum tentu berbanding lurus dengan keterwakilan di posisi strategis, karena distribusi jabatan sering kali memperlihatkan konsentrasi perempuan pada peran pelaksana. Kondisi ini mengindikasikan adanya *gender concentration* di sektor publik, yang penting untuk dianalisis lebih lanjut guna memastikan peluang promosi dan pengambilan keputusan juga setara.

BAB IX

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan data perspektif gender dan anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024, dapat kita lihat masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan anak. Beberapa isu penting dan untuk lebih di perhatikan adalah :

1. Ketersediaan Data

- a. Menjadikan Data Terpilah sebagai isu strategis untuk di programkan dan dilaksanakan pada masing-masing OPD baik di Tingkat Kabupaten maupun di Tingkat Kecamatan dan Desa.
- b. Ketersediaan Data Terpilah sangat penting dalam menyelesaikan ketimpangan dan keadilan gender dan anak pada semua bidang pembangunan, yang idealnya akan memiliki pendekatan spesifik sesuai kebutuhan.
- c. Meminimalisir panduan format dan deskripsi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis gender dan anak pada setiap indikator pembangunan. Hal ini akan sangat membantu komunikasi dan koordinasi data yang bersifat sektoral.
- d. Beberapa Isu Menarik yang menjadi perhatian Pendidikan
- e. Masih ada siswa di Kabupaten Bengkalis yang putus sekolah disetiap jenjang mulai SD, SMP dan SMA. Dan masih banyak masyarakat Kabupaten Bengkalis yang belum mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi.
- f. Kesehatan
- g. Isu Nasional mengenai partisipasi aktif laki-laki dalam ber- KB sudah ada sejak Tahun 1994, namun sampai saat ini masih belum diperoleh hasil yang signifikan. Sebagai daerah dengan dinamika kehidupan sosial yang relatif stabil, perlu dicari terobosan terbaru yang dapat mengangkat nama Kabupaten Bengkalis yang mempelopori kampanye peran aktif laki-laki dalam ber- KB meskipun sampai tahun 2023 angka partisipasi KB Pria Aktif mencapai angka 31,442 yang sangat jauh lebih tinggi dibanding Peserta KB Perempuan aktif sebesar 28,812

2. Peranan Perempuan di Sektor Publik

Masih perlu dipersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi dan tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis (partisipasi dalam bidang legislatif) sejak dari sekarang. Persiapan itu bisa dalam bentuk pendidikan dan pembekalan terhadap kader-kader dan simpatisan dari partai politik. Sehingga pada pemilu berikutnya kita sudah memiliki caleg-caleg perempuan yang siap bersaing di ranah politik.

3. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menarik untuk dilakukan pengkajian terhadap kebijakan/ peraturan yang telah di buat dan dilaksanakan pada jajaran pemerintahan, apakah berpotensi menimbulkan diskriminasi serta tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena sampai tahun 2025 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis terus mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi hal ini tidak berarti ada peningkatan kasus KDRT di Kabupaten Bengkalis. Di sisi lain, hal ini menunjukkan mulai adanya keberanian dari masyarakat terutama perempuan dan anak melaporkan kasus kekerasan yang dialami.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilihat dari buku Perspektif Gender dan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan gender dan anak untuk dapat membuka dan membagi informasi dengan mudah dan efektif.
2. Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap peranan dan keterlibatan lembaga-lembaga pengarusutamaan gender dan anak dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan gender di Kabupaten Bengkalis.

Program penyusunan Buku Data Perspektif Gender dan Anak Kabupaten Bengkalis diperlukan setiap tahun untuk mendorong ketersediaan data gender yang berkuantitas dan berkualitas di semua bidang instansi terkait. Diharapkan

data dan informasi gender nantinya merupakan data yang mudah didapat. Dengan disusunnya buku ini secara berkesinambungan juga akan membantu ketersediaan data gender yang lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan dan relevan. Dengan demikian ini akan menjadi bahan rujukan dalam perumusan kebijakan mulai perencanaan, sampai pemantauan dan evaluasi program- program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Sri Haryati, Fajar Raka Pratama. (2025). *Statistik Pendidikan Kabupaten Bengkalis 2024* : Badan Pusat Statistik Bengkalis.
- Sri Haryati, Fajar Raka Pratama, Dessy Wahyuni. (2024). *Statistik Ketenagakerjaan 2023* : Badan Pusat Statistik Bengkalis.
- Suwarto, Adi Sutrisno. (2024). *Satu Data Kabupaten Bengkalis 2024* : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman. (2024). *Buku Data Profil Gender Kabupaten Pasaman 2024* : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.



PROFIL GENDER DAN ANAK

**KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**

Jl. Pertanian No.561, Senggoro, Kec. Bengkalis
Email : dpppa@bengkaliskab.go.id